



**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)



PADANG, JUNI 2026

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Laporan Keuangan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD, yang nantinya akan dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

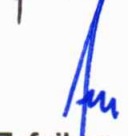
Laporan Keuangan ini terdiri dari ; 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca dan 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayanya kepadanya.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

✓ Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN OPERASIONAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Informasi Umum	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	13
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja	22
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	
Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	29

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
5.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
5.1.1.	Belanja	30
5.2.	Penjelasan Neraca	34
5.2.1.	Aset	34
5.2.2.	Kewajiban.....	45
5.2.3.	Ekuitas	46
5.3.	Penjelasan Laporan Operasional (LO)	46
5.3.1.	Beban	46
5.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
5.5.	Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubung- an dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan re- Konsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.	52
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	53
6.1.	Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	53
6.1.	Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi	60
BAB VII	PENUTUP	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2025
- Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2025
- Lampiran 3 LRA,LO, Neraca dan LPE Tahun 2025 dari aplikasi SIPD
- Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Lampiran 5 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan GU, TU, LS
- Lampiran 6 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan Jenis Belanja
- Lampiran 7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 10 Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 11 Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2025
- Lampiran 13 Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2025
- Lampiran 14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025
- Lampiran 15 Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2025
- Lampiran 16 Daftar Persediaan per 31 Desember 2025
- Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025
- Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2025
- Lampiran 19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2025
- Lampiran 20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 21 Daftar Belanja Modal Tahun 2025
- Lampiran 22 Daftar Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 23 Daftar Belanja Barang dan Jasa Yang Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025
- Lampiran 25 Register SP2D SKPD Tahun 2025
- Lampiran 27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- Lampiran 28 Jurnal Penyesuaian Tahun 2025

LAMPIRAN LAINNYA



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Operasional; c) Neraca; d) Laporan Perubahan Ekuitas; e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-
1,1,01	PAJAK DAERAH	-	-		-
1,1,02	RETRIBUSI DAERAH	-	-		-
1,1,03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-		-
1,1,04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	-	-		-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-		-
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	18.853.900.909.00
2,1,01	BELANJA PEGAWAI	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	11.185.076.922.00
2,1,02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.555.065.080	5.332.174.688,00	95,99	7.668.823.987.00
2.2	BELANJA MODAL	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000.00
2,2,01	- Tanah	-	-	-	-
2,2,02	- Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000.00
2,2,03	- Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2,2,04	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
2,2,05	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	18.931.696.909.00
	SURPLUS (DEFISIT)	17.602.886.289,00)	17.163.099.094,00	97,50	(18.931.696.909.00)

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

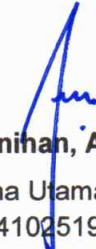

Dr. Zefnifan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2025

U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	11.164.364.880,00	11.553.833.553,00	(389.468.673,00)	(3,37)
Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50	(2.212.516.839,50)	(29,12)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96	(89.689.869,44)	(8,19)
Beban Penyisihan Piutang				
JUMLAH BEBAN OPERASI	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
JUMLAH BEBAN	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
SURPLUS /DEFISIT LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)	(2.691.675.381,94)	(13,29)

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

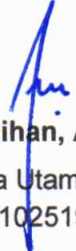
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (Audited)

U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited))
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas BLUD	-	-
Setara Kas	-	-
Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
Beban Dibayar Dimuka	43.000.197,00	50.391.793,00
Persediaan	38.654.961,00	84.350.775,00
Jumlah Aset Lancar	81.665.158,00	134.742.568,00
ASET TETAP		
Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00
Peralatan dan Mesin	18.904.003.865,00	18.603.903.065,00
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(24.211.276.524,36)	(23.186.418.635,84)
Jumlah Aset Tetap	22.724.665.655,64	23.449.422.744,16
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00)	1.749.083.432,00)
Aset Tidak Bermanfaat	548.841.000,00	548.841.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(548.841.000,00)	(548.841.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	22.806.320.813,64	23.584.165,312,16
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	22.645.962,00	416.266.988,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	22.645.962,00	416.266.988,00
JUMLAH KEWAJIBAN	22.645.962,00	416.266.988,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
Koreksi Ekuitas		
Surplus / Defisit – LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
Ekuitas SAL		
Estimasi Perubahan SAL	17.163.099.094	18.931.696.909,00
Surplus / Defisit – LRA	17.163.099.094	(18.931.696.909,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	(17.163.099.094)	18.931.696.909,00
Jumlah Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.806.320.813,64	23.584.165.312,16

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025

No	U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	Ekuitas Awal	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62
	Koreksi Ekuitas	6.960.395,00	(532.085)
	Jumlah	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
2	Surplus/Defisit-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
3	RK PPKD	(17.163.099.094)	18.931.696.909,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	- Koreksi Hutang Jangka Pendek		
	- Akumulasi Penyusutan Pertama Kali		
	- Mutasi Tambah Aset Tetap		
	- Mutasi Kurang Aset Lainnya		
5	Ekuitas Akhir	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah melalui tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025 meliputi hal-hal berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban LO
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Tujuan pembangunan perencanaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercapainya koordinasi, integritas, sinkronisasi, sinergitas perencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat tercapai pada tahun pertama merupakan sasaran tahun pertama dari RPJMD 2025-2029, hal ini tertuang dalam perencanaan strategis (Renstra) Bappeda yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan khususnya belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja pegawai maupun belanja barang jasa dan modal yaitu melakukan efiseinsi dan efektifitas di segala bidang. Namun demikian, efiseinsi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan/ditargetkan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan pokok.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi belanja yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya, menetapkan 3 Program dengan didukung oleh 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang tergabung dalam urusan wajib perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhabilitasi

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan. (RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2024)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang

	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil verifikasi rancangna dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Dalam tahun anggaran 2025, pada APBD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 20.076.459.874,00. Pada APBD-P alokasi belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp 17.602.886.289,00 Realisasi tahun 2025 adalah Rp. 17.163.099.094,00 dengan persentase 97,50 % dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59
Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34
Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080	5.332.174.688,00	95,99
Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59
Jumlah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50

(dalam satuan rupiah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 17.163.099.094,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,50 %

Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 11.752.921.209,00 dan realisasi sebesar Rp 11.557.864.406,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 98,34 %.

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 5.555.065.080,00 dan realisasi sebesar Rp 5.332.174.688,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,99 %.

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp 294.900.000,00 dengan realisasi Rp 273.060.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 92,59 %.

1) Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
Belanja Daerah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	439.787.195,00
Belanja Operasi	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	417.947.195,00
Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	195.056.803,00
Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080,00	5.332.174.688,00	95,99	222.890.392,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	21.840.000,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan & Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	21.840.000,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	439.787.195,00

(dalam satuan rupiah)

2) Capaian Belanja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 17 Sub

sehingga secara total Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan per 31 Desember 2025 atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : terdiri dari 8 kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. dengan anggaran sebesar Rp 16.209.768.037,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.845.353.219,00 atau 97,75 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 11.944.081.209,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.748.424.406,00 atau 98,36 % dari total anggaran dengan sisa Rp 195.656.803,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; jumlah anggaran Rp 11.752.921.209,00 realisasi belanja Rp 11.557.864.406,00 atau 98,34 % dan sisa anggaran Rp 195.056.803,00

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: jumlah anggaran Rp 191.160.000,00 realisasi belanja Rp 190.560.000,00 atau 99,69 % dan sisa anggaran Rp 600.000,00

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 106.759.690,00 dan terealisasi sebesar Rp 90.845.358,00 atau 85,09 % dari total anggaran dengan sisa Rp 15.914.332,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : jumlah anggaran Rp 106.759.690,00 realisasi belanja Rp 90.845.358,00 atau 85,09 % dan sisa anggaran Rp 15.914.332,00

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.050.000,00 atau 94,00% dari total anggaran dengan sisa Rp 450.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1.) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang ; jumlah anggaran Rp 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.050.000,00 atau 94,00% dari total anggaran dengan sisa Rp 450.000,00

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** , dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.836.825.360,00 dan terealisasi sebesar Rp1.786.201.300,00 atau 97,24 % dari total anggaran dengan sisa Rp50.624.060,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** ; jumlah anggaran Rp 8.263.730,00 realisasi belanja Rp 8.258.400,00 atau 99,94 % dan sisa anggaran Rp 5.330,00
- 2) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** : jumlah anggaran Rp 8.965.700,00 realisasi belanja Rp 8.800.000,00 atau 98,15 % dan sisa anggaran Rp 165.700,00
- 3) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** ; jumlah anggaran Rp 100.354.809,00, realisasi belanja Rp 95.640.784,00 atau 95,30 % dan sisa anggaran Rp 4.714.025,00
- 4) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** : jumlah anggaran Rp 170.468.000,00 realisasi belanja Rp 158.166.556,00 atau 92,78 % dan sisa anggaran Rp 12.301.444,00
- 5) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** ; jumlah anggaran Rp 1.171.773.121,00 realisasi belanja Rp 1.138.335.560,00 atau 97,15 % dan sisa anggaran Rp 33.437.561,00
- 6) **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**: jumlah anggaran Rp 377.000.000,00 realisasi belanja Rp 377.000.000,00 atau 100,00 % dan sisa anggaran Rp -

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** , dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 294.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 273.060.000,00 atau 92,59 % dari total anggaran dengan sisa Rp 21.840.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 294.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 273.060,00 atau 92,59 % dari total anggaran dengan sisa Rp 21.840.000,00

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.656.601.778,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.617.899.806,00 atau 97,66 % dari total anggaran dengan sisa Rp 38.701.972,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** ; jumlah anggaran Rp 238.140.000,00 realisasi belanja Rp 230.349.274,00 atau 96,73 % dan sisa anggaran Rp 7.790.726,00
 - 2) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** ; jumlah anggaran Rp 1.418.461.778,00 realisasi belanja Rp 1.387.550.532,00 atau 97,82 % dan sisa anggaran Rp 30.911.246,00
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** , dengan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 363.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 321.872.349,00 atau 88,65% % dari total anggaran dengan sisa Rp 41.227.651,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** ; jumlah anggaran Rp 216.000.000,00 realisasi belanja Rp 208.443.461,00 atau 96,50 % dan sisa anggaran Rp 7.556.539,00
 - 2) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 55.900.000,00 realisasi belanja Rp 37.991.800,00 atau 67,96 % dan sisa anggaran Rp 17.908.200,00
 - 3) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 54.050.000,00 realisasi belanja Rp 43.650.328,00 atau 80,76 % dan sisa anggaran Rp 10.399.672,00
 - 4) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 37.150.000,00 realisasi belanja Rp 31.786.760,00 atau 85,56 % dan sisa anggaran Rp 5.363.240,00

II. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 766.461.262,00 dan terealisasi sebesar Rp 748.050.050,00 atau 97,60 % dari total anggaran dengan sisa Rp 18.411.212,00, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 611.922.279,00 dan terealisasi sebesar Rp 596.219.550,00 atau 97,43 % dari total anggaran dengan sisa Rp 15.702.729,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
 - 1) **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 611.922.279,00, realisasi belanja Rp 596.219.550,00 atau 97,43% % dan sisa anggaran. Rp 15.702.729,00

2. **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**; terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 91.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 90.193.700,00 atau 98,25 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.606.300,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 91.800.000,00 realisasi belanja Rp 90.193.700,00 atau 98,25 % dan sisa anggaran Rp 1.606.300,00

3. **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 62.738.983,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.636.800,00 atau 98,24 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.102.183,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 62.738.983,00, realisasi belanja Rp 61.636.800,00 atau 98,24 % dan sisa anggaran Rp 1.102.183,00

III. **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 626.656.990,00 dan terealisasi sebesar Rp 569.695.825,00 atau 90,91 % dari total anggaran,dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 289.806.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.968.500,00 atau 93,50 % dengan sisa anggaran Rp 18.837.500,00 sbb :

1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 74.314.000,00 realisasi belanja Rp 71.160.000,00 atau 95,76 % dan sisa anggaran Rp 3.154.000,00

2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 6.232.000,00 realisasi belanja Rp 6.230.000 atau 99,97 % dan sisa anggaran Rp 2000,00

3) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp

23.677.000,00 realisasi belanja Rp 10.993.500,00 atau 46,43 % dan sisa anggaran Rp 12.683.500,00

4) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 33.650.000,00 realisasi belanja Rp 32.108.000,00 atau 95,42 % dan sisa anggaran Rp 1.542.000,00

5) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia** ; jumlah anggaran Rp 12.383.000,00 realisasi belanja Rp 12.241.000,00 atau 98,85 % dan sisa anggaran Rp 142.000,00

6) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia** ; jumlah anggaran Rp 139.550.000,00 realisasi belanja Rp 138.236.000,00 atau 99,06 % dan sisa anggaran Rp 1.314.000,00

2. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan 6** (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 170.278.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.607.025,00 atau 85,51 % dengan sisa anggaran Rp 24.671.725,00 sbb :

1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 38.615.000,00 realisasi belanja Rp 38.403.300,00 atau 99,45 % dan sisa anggaran Rp 211.700,00

2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian** ; jumlah anggaran Rp 23.488.000,00 realisasi belanja Rp 22.691.400,00 atau 96,61 % dan sisa anggaran Rp 796.600,00

3) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian** ; jumlah anggaran Rp 43.821.500,00 realisasi belanja Rp 38.982.000 atau 88,96 % dan sisa anggaran Rp 4.389.500,00

4) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 11.075.000,00 realisasi belanja Rp 10.028.925,00 atau 90,55% dan sisa anggaran Rp 1.046.075,00

- 5) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 22.265.500,00 realisasi belanja Rp 21.944.400,00 atau 98,56 % dan sisa anggaran Rp 321.100,00
 - 6) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 31.013.750,00 realisasi belanja Rp 13.557.000,00 atau 43,71 % dan sisa anggaran Rp 17.456.750,00
3. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** dengan 5 (lima) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 166.572.240,00 dan terealisasi sebesar Rp 153.120.300,00 atau 91,92 % sbb :
- 1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 14.397.000,00 realisasi belanja Rp 13.775.700,00 atau 95,68 % dan sisa anggaran Rp 621.300,00
 - 2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 22.507.240,00 realisasi belanja Rp 21.692.800,00 atau 96,38 % dan sisa anggaran Rp 814.440,00
 - 3) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 15.038.000,00 realisasi belanja Rp 14.244.400,00 atau 94,72 % dan sisa anggaran Rp 793.600,00
 - 4) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 13.708.000,00 realisasi belanja Rp 13.380.400,00 atau 97,61 % dan sisa anggaran Rp 327.600,00
 - 5) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan** ; jumlah anggaran Rp 100.922.000,00 realisasi belanja Rp 90.027.000,00 atau 89,20 % dan sisa anggaran Rp 10.895.000,00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja bisa tercapai.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2025 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Untuk tahun anggaran 2023 berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Penyusutan Aset

1. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

2. Amortisasi.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus bagi ATB berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1)	Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	11.185.076.922,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk realisasi Tahun 2025 mencapai 98,34 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar 3,33 %. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji Pokok ASN	4.253.666.436	4.217.815.560	99,16	4.343.762.683
Belanja Tunjangan Keluarga	413.636.824	407.716.160	98,57	430.757.724
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.310.000	135.290.000	93,75	149.920.000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	362.520.000	358.380.000	98,86	339.309.690
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.585.000	92.495.000	98,84	122.910.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	218.701.460	216.246.120	98,88	228.485.100
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.853.330	61.624.482	99,63	54.387.286
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	60.128	48.802	81,16	52.918
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	348.976.236	340.622.500	97,61	320.624.679
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.854.085	8.658.022	97,79	8.876.542
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.562.510	25.974.316	97,79	26.629.801
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.158.415.965	4.070.745.797	97,89	3.457.574.564
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.661.779.235	1.622.247.647	97,62	1.488.305.935
Belanja Honorarium				213.480.000
Jumlah	11.752.921.209	11.557.864.406	98,34	11.185.076.922

Realisasi belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto dari permintaan belanja gaji ASN tambahan penghasilan ASN sesuai SP2D yaitu sebesar Rp 11.567.864.406,00 Tidak terdapat pengembalian belanja pegawai tahun 2025. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 195.056.803,00 atau 1,66 % dari anggaran yaitu sisa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 67.855.047,00 dan sisa belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 127.201.756,00

2) Belanja Barang dan Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2)	Belanja Barang & Jasa	5.555.065.080,00	5.332.174.688,00	95,99	7.668.823.987,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 95,99 % Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.309.362	926.469.765	90,89	1.856.402.987,00
Belanja Jasa Kantor	3.036.796.028	2.964.956.506	97,63	2.388.527.210,00
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	106.759.690	90.845.358	85,09	103.207.943,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				136.890.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan	7.500.000	7.050.000	94,00	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293.050.000	263.612.321	89,95	406.672.947,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.050.000	39.750.328	79,42	60.056.729,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.041.600.000	1.039.490.410	99,80	2.625.626.206,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		91.439.965,00
Jumlah	5.555.065.080	5.332.174.688	95,99	7.668.823.987

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 222.890.392,00 atau 4,01 %, adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	92.839.597,00
- Belanja Jasa Kantor	Rp	71.839.522,00
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Rp	15.914.332,00
- Belanja Kursus/Pelatihan	Rp	450.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	29.437.679,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	10.299.672,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	2.109.590,00

Sisa belanja barang jasa pada masing-masing rekening tersebut disebabkan oleh sisa belanja pada setiap kegiatan yang tidak bisa direalisasikan/ sisa mati dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2	Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dan 2024. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 92,59 %. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) a	B. Modal Tanah	0,00	0.00	0,00	0,00

Tidak ada belanja modal tanah pada tahun 2025

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) b	B. Modal Peralatan & Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 92,59 % dari anggarannya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
B. Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Kantor	-	-	0,00	2.796.000,00
B. Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0,00	600.000,00
B. Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Studio	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Komunikasi	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Kedokteran	-	-	0,00	-
B. Modal Komputer Unit	294.900.000,00	273.060.000,00	0,00	-
B. Modal Peralatan Komputer	-	-	0,00	74.400.000,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Sisa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 21.840.000,00 atau 7,41 % dari anggaran adalah sisa tender/ sisa belanja yang tidak bisa dimanfaatkan.

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) c	B. Modal Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2025.

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) d	B. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) e	B. Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2025.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah/Negara.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	19.213.418.866	19.213.418.866	0,00

Penambahan adalah sejumlah penerimaan SP2D UP, GU, TU dan LS selama tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 17.229.601.074,00 dan penerimaan pajak negara sebesar Rp. 750.205.662,00.

Dan pengurangan adalah seluruh realisasi belanja, penyetoran pajak negara, pengembalian belanja serta penyetoran sisa UYHD yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025.

Daftar realisasi SP2D, SPJ dan sisa UYHD dapat dilihat pada Lampiran 1, Pengembalian belanja dapat dilihat pada Lampiran 5, dan rincian pungutan dan setoran pajak dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
2. Beban Dibayar Dimuka	43.000.197,00	50.391.793,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024, berupa Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan dinas) sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dan 1 unit gedung kantor dengan nilai pembayaran Rp. 90.845.348,00 yaitu :

- 10 kendaraan, jangka waktu Maret 2025 s/d Feb 2026 Rp 53.699.620,00
- 1 gedung, jangka waktu Des 2025 s/d Jan 2026 Rp 37.145.738,00

Yang menjadi beban LO Tahun 2025 yaitu:

Beban LO Tahun 2025 yang merupakan premi tahun 2025

- 10 kendaraan, 10 bulan (Maret s/d Des 2025) Rp 44.749.683,00
- 1 gedung, 1 bulan (Des 2025) Rp 3.095.478,00

Yang menjadi beban tahun 2026 / beban dibayar dimuka yaitu:

- 10 kendaraan , 2 bulan (Jan 2026 s/d Feb 2026) Rp 8.949.937,00
- 1 gedung , 11 bulan (Jan 2026 s/d Nov 2026) Rp 34.050.260,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Asuransi 10 unit Kendaraan Dinas untuk 12 bulan yaitu bulan Maret 2025 s/d Februari 2026 senilai Rp. 53.699.620,00. Beban LO tahun 2025 (Maret s/d Des 2025) yaitu Rp 44.749.683,00. Beban dibayar dimuka yaitu untuk bulan Januari s/d Februari 2026 sebesar Rp 8.949.937,00
- Asuransi 1 unit gedung untuk 12 bulan yaitu Desember 2025 s/d November 2026 senilai Rp. 44.749.683,00. Beban LO tahun 2025 (Des 2025) yaitu Rp 3.095.478,00. Beban dibayar dimuka dari Januari s/d November 2026 sebesar Rp. 34.050.260,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	50.391.793,00	90.845.358,00	98.236.954,00	43.000.197,00

Penambahan adalah adanya belanja asuransi barang milik daerah selama tahun 2025, pengurangan adalah asuransi yang menjadi beban selama tahun 2025.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
3. Persediaan	38.654.961,00	84.350.775,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Persediaan per 31 Desember 2025 yaitu Persediaan barang pakai habis yang terdiri dari :

• Bahan Bakar Minyak	Rp	5.760.000,00
• Alat Tulis Kantor	Rp	3.792.426,00
• Kertas dan Cover	Rp	3.343.875,00
• Bahan Komputer	Rp	12.731.700,00
• Alat Listrik	Rp	3.241.200,00
• Bahan Kantor Lainnya	Rp	9.785.760,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Bakar Minyak	17.836.500	130.173.121	142.249.621	5.760.000
Alat Tulis Kantor	14.356.075	8.916.385	19.480.034	3.792.426
Kertas dan Cover	10.622.200	7.909.010	15.187.335	3.343.875
Bahan Cetak	-	170.468.000	170.468.000	-
Bahan Komputer	39.232.500	34.996.363	61.497.163	12.731.700
Alat Listrik	-	8.263.730	5.022.530	3.241.200
Bahan Kantor Lainnya	2.303.500	25.793.351	18.311.091	9.785.760
Jumlah	84.350.775	386.519.960	432.215.774	38.654.961

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16

Aset Tetap

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
4. Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

Neraca Awal 2005 Rp.5.600.590.000,00

Daftar Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2025

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
5. Peralatan dan Mesin	18.904.003.865,00	18.603.903.065,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 736.681.825,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025 Rp. 18.167.322.040,00

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	18.603.903.065,00	300.100.800,00	-	18.904.003.865,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	17.389.317.558,52	560.376.341,00	46.598,52	17.949.647.301,00
Nilai Buku	1.214.585.506,48	(260.275.541,00)	(46.598,52)	954.356.564,00

Saldo Audited Peralatan dan Mesin Tahun 2025 18.603.903.065,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025	273.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2025	0,00
Koreksi Nilai	0,00
Hibah	0,00
Mutasi Antar SKPD	27.040.800,00
Reklas	0,00

Total Mutasi Tambah 300.100.800,00

Mutasi Kurang

BM yang tidak dikapitalisir	0,00
Koreksi Nilai	0,00
Penghapusan	
Mutasi antar SKPD	

Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	18.904.003.865,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 273.060.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Terdapat mutasi tambah antar SKPD yaitu mutasi aset dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa 2 (dua) unit proyektor senilai Rp 27.040.800,00
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2025

Penjelasan Mutasi Kurang

- Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisir tahun 2025.
- Tidak terdapat mutasi antar tahun 2025.
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2025

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
6. Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025	Rp	22.386.421.945,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	-	-	22.386.421.945,00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	5.797.101.077,32	471.524.145,24	6.995.999,20	6.261.629.223,36
Nilai Buku	16.589.320.867,68	(471.524.145,24)	(6.995.999,20)	16.124.792.721,64

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2024	22.386.421.945,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2025	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir	0,00
Reklas dari peralatan dan mesin	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	22.386.421.945,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aktiva tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23

.Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
7. Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025 Rp. 44.926.370,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	44,926,370.00	-	-	44,926,370.00
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	44,926,370.00			44,926,370.00

Saldo Audited 2024 44.926.370,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025 0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Saldo per 31 Desember 2025 44.926.370,00

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
8. Akumulasi Penyusutan	24.211.276.524,36	23.186.418.635,84

Terdiri dari :

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| • Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | 17.949.647.301,00 | 17.389.317.558,52 |
| • Akumulasi Penyusutan Gdg. dan Bangunan | 6.261.629.223.36 | 5.797.101.077,32 |
| • Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| • Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	17.389.317.558,52	560.376.341,00	46.598,52	17.949.647.301,00
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	5.797.101.077,32	471.524.145,24	6.995.999,20	6.261.629.223,36
Akm Peny. Jalan Irigasi dan Jaringan	-			-
Akm Peny. Aset Tetap Lainnya	-			-
Jumlah Akm Penyusutan	23.186.418.635,84	1.031.900.486,24	7.042.597,72	24.211.276.524,36

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	17.389.317.558,52	5.797.101.077,32	0,00	0,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	560.376.341,00	471.524.145,24	0,00	0,00
o Beban Penyusutan Tahun 2025	533.335.538,28	471.524.145,24	0,00	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	27.040.800,00	0,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	2,72	0,00		
• JUMLAH MUTASI KURANG:	46.598,52	6.995.999,20	0,00	0,00
o Double Record	0,00	0,00	0,00	0,00
o Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
o Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	46.598,52	6.995.999,20	0,00	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 Des 2025	17.949.647.301,00	6.261.629.223,26		

Saldo Audited 2024

Rp 23.186.418.635,84

Terdiri dari saldo awal :

Akm Peny. Peralatan dan Mesin

Rp **17.389.317.558,52**

Akm Peny. Gedung dan Bangunan

Rp **5.797.101.077,32**

Mutasi Tambah

Rp 1.031.900.486,24

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp 533.335.538,28

Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin

Rp 27.040.800,00

Koreksi saldo awal Akm Peny Peralatan dan Mesin

Rp 2,72

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp 471.524.145,24

Koreksi saldo awal Akm Peny Gedung dan Bangunan

Rp 0,00

Mutasi Kurang	Rp	7.042.597,72
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Reklasifikasi	Rp	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	46.598,52
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Gedung dan Bangunan	R	6.995.999,20
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	24.211.276.524,36

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
9. Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.749.083.432,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	0,00	0,00	1.749.083.432,00
Akm Amortisasi	1.749.083.432,00	0,00	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Audited 2024	1.749.083.432,00
Mutasi Tambah	
Belanja Barang dan Jasa tahun 2025	0,00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.749.083.432,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
10. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2024	1.749.083.432,00
● JUMLAH MUTASI TAMBAH:	
○ Kurang Catat/tdk tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi + Saldo Awal	
○ Beban Penyusutan Tahun 2025	0,00
● JUMLAH MUTASI KURANG:	
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025	1.749.083.432,00

	1.749.083.4
Saldo Audited 2024	32,00
Mutasi Tambah	
Beban Amortisasi	0,00
Mutasi Kurang	0,0
Total Mutasi	0,00
	1.749.083.4
Saldo per 31 Desember 2025	32,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
11. Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, yang dicatat berdasarkan nilai buku. Dasar penilaian Aset berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025 Tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset tidak bermanfaat tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	0,00	0,00	548.481.000,00
Akm Penyusutan	548.481.000,00	0,00	548.481.000,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	548.481.000,00

Saldo audited 2024	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	548.481.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aset tidak bermanfaat tahun 2025.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
3 SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	548.481.000,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	0,00
o Kurang Catat/tdk tercatat	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,00
o Beban Penyusutan Tahun 2023	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	0,00
o Double Record	0,00
o Hibah	0,00
o Penghapusan	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00
SALDO AKHIR PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2025	548.481.000,00

Saldo Audited 2024	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Akm Penyusutan	0,00
	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Penghapusan	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	548.481.000,00

Mutasi tambah dan mutasi kurang tahun 2024 dan Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2025, dapat dilihat pada Lampiran 18

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
13. Hutang Belanja	22.645.962,00	416.266.988,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2025 dan 2024. Hutang belanja ini terdiri hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hutang Belanja Pegawai

Rp.0,00

Tidak terdapat utang belanja pegawai pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Pegawai	393.499.526,00	0,00	393.499.526,00	0,00

Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

b. Hutang Belanja Barang dan Jasa

Rp. 22.645.962,00

Saldo Hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 22.645.962,00 yang terdiri dari hutang belanja telepon sebesar Rp.263.292,00, listrik sebesar Rp.16.468.233,00 dan air sebesar Rp 5.914.437,00 yang merupakan pemakaian bulan November dan Desember 2025 dan akan dibayarkan pada tahun 2026.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Barang & Jasa	22.767.462,00	22.645.962,00	22.767.462,00	22.645.962,00

Pengurangan sebesar Rp. 26.172.321,00 merupakan Hutang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 berupa Telepon, Listrik dan Air yang telah dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2025. Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
14. Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024. Ekuitas ini terdiri dari:

a. Ekuitas	Rp	23.174.858.719,16
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(17.554.282.961,52)
c. Estimasi Perubahan SAL	Rp.	17.163.099.094,00
d. Surplus/Defisit LRA	Rp .	(17.163.099.094,00)
e. RK/PPKD	Rp	17.163.099.094,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	22.783.674.851,64

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi. Estimasi perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA.

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
a. Beban Pegawai	11.164.364.880,00	11.553.833.553,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Beban Pegawai	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Belanja Gaji Pokok ASN	4.217.815.560	4.343.762.683
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	407.716.160	430.757.724
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.290.000	149.920.000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	358.380.000	315.639.850
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.495.000	122.910.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	216.246.120	228.485.100
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.624.482	53.603.197
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	48.802	52.918
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	328.148.375	332.809.838
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.658.022	8.876.542
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	25.974.316	26.629.801
Belanja luran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.799.510.028	3.728.810.333
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.512.458.015	1.598.095.567
Honorarium		213.480.000
Jumlah	11.164.364.880	11.553.833.553

Terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada LRA dan beban pegawai pada LO, sebagai berikut :

Objek Pegawai LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	4.217.815.560	4.217.815.560	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	407.716.160	407.716.160	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	135.290.000	135.290.000	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	358.380.000	358.380.000	-
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.495.000	92.495.000	-
Beban Tunjangan Beras ASN	216.246.120	216.246.120	-
Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.624.482	61.624.482	-
Beban Tunj Pembulatan Gaji ASN	48.802	48.802	-
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	340.622.500	328.148.375	(12.474.125,00)
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.658.022	8.658.022	-
Beban luran Jaminan Kematian ASN	25.974.316	25.974.316	-
Beban luran Tapera	-	-	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	4.070.745.797	3.799.510.028	(271.235.769,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	1.622.247.647	1.512.458.015	(109.789.632,00)
Jumlah	11.557.864.406,00	11.164.364.880,00	(393.499.526,00)

Penjelasan selisih :

Penyesuaian pengakuan Beban iuran jaminan kesehatan ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Iuran Jaminan Kesehatan TPP Beban Kerja TPP Kondisi Kerja		12.474.125,00 271.235.769,00 109.789.632,00				12.474.125,00 271.235.769,00 109.789.632,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2024(Audited)
b. Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024. Beban barang dan jasa ini terdiri dari :

Beban Barang dan Jasa	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Beban Bahan Pakai Habis	972.165.579,00	1.832.025.062,00
Beban Jasa Kantor	2.964.752.806,00	2.383.983.161,00
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	98.236.954,00	60.881.167,50
Beban Sewa Gedung dan Bangunan		136.890.000,00
Beban Kursus/ Pelatihan Sewa Gedung dan Bangunan	7.050.000,00	
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya		-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi		-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimtek		-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.612.321,00	406.672.947,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.750.328,00	60.056.729,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.039.490.410,00	2.625.626.206,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		91.439.965
Jumlah	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50

Saldo / jumlah Beban Barang dan Jasa tersebut diatas merupakan saldo/ jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

Perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan Beban Barang dan Jasa- LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja Barang Jasa LRA/LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Beban Barang dan Jasa LO	Selisih
Beban Bahan Pakai Habis	926.469.765,00	972.165.579,00	(45.695.814,00)
Beban Jasa Kantor	2.964.956.506,00	2.964.752.806,00	203.700,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	90.845.358,00	98.236.954,00	(7.391.596,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan			-
Beban Kursus/ Pelatihan	7.050.000,00	7.050.000,00	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.612.321,00	263.612.321,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.750.328,00	39.750.328,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.039.490.410,00	1.039.490.410,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri			-
Jumlah	5.332.174.688,00	5.385.058.398,00	(52.883.710,00)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan per Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Bahan Bakar dan Pelumas	16.503.000,00			4.426.500,00	16.503.000,00	4.426.500,00
Alat Tulis Kantor	7.035.181,00		3.528.468,00		10.563.649,00	
Kertas dan Cover	3.126.370,00		4.151.955,00		7.278.325,00	
Bahan Komputer	5.493.495,00		21.007.305,00		26.500.800,00	
Alat Listrik				3.241.200,00		3.241.200,00
Bahan Kantor lainnya	1.708.100,00			9.190.360,00	1.708.100,00	9.190.360,00

- Penyesuaian pembayaran hutang dan mengakui hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 yaitu untuk pemakaian telepon bulan November dan Desember 2025 air bulan Desember 2025 dan listrik bulan Desember 2025 yang dicatat sebagai hutang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang pembayarannya dilakukan di tahun 2026.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor	0,00	22.849.662,00	22.645.962,00	-	22.645.962,00	22.849.662,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	35.799.747,00	33.746.559,00	34.050.260,00	43.495.044,00	69.850.001,00	77.241.603,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2023 (Audited)
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	533.335.538,28	616.029.407,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.524.145,24	478.520.145,12
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96

Saldo/jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut diatas merupakan saldo/jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

1. Ekuitas Awal	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62
2. Koreksi Ekuitas	6.960.395,00	(532.085,00)
3. Surplus/Defisit LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
4. RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
6. Ekuitas Akhir	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Penjelasan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 23.167.898.324,16 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2024.
2. Terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp 6.960.395,00 yaitu selisih revaluasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 6.995.999,20 dan koreksi lain-lain sebesar Rp 35.604,20 yang terdiri dari koreksi akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp 46.595,80, koreksi utang belanja telepon tahun 2024 sebesar Rp 60.000,00 dan koreksi utang belanja air sebesar Rp 22.200,00

3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 17.554.282.961,52 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO tahun 2025
4. RK PPKD sebesar 17.163.099.094,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2025 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar nihil.
6. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 22.783.674.851,64 adalah saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	11.557.864.406,00	11.164.364.880,00	393.499.526,00
- Belanja Barang dan Jasa	5.332.174.688,00	5.385.058.398,00	(52.883.710,00)
- Belanja Modal	273.060.000,00	-	273.060.000,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.004.859.683,52	(1.004.859.683,52)
Jumlah	17.163.099.094,00	17.554.282.961,52	391.183.867,52

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**PENJELASAN ATAS
INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN****6.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi

secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda;

- h. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

- a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b). Sub. Bagian Keuangan
- c). Sub. Bagian Program

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
- e. Penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.

- j. Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :

- a). Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b). Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c). Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :

- a). Sub Bidang Pemerintahan;
- b). Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

- a). Sub Bidang Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- b). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan;
- c). Sub Bidang Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan

dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi :

- a). Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b). Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
- c). Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

6.2 Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi OPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Bappeda Propinsi Sumatera Barat mempunyai personil sebanyak 71 ASN , dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	0	2	2
4	Fungsional Perencana Madya	0	3	3
4	Fungsional Perencana Muda	9	6	15
4	Fungsional Perencana Pertama	5	3	8
5	Pelaksana	23	15	38
Jumlah		39	29	71

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	10	13	23
3	Strata 1	15	15	30
4	D3	0	1	1
5	SLTA	16	1	17
6	SLTP		0	0
Jumlah		41	30	71

**DAFTAR PEGAWAI ASN PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2025**

Golongan	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsional Perencana	Fungsional Umum	
Gol IV/d	-	1	-	-	-	-	1
Gol IV/c					-		0
Gol IV/b			4		2		6
Gol IV/a			0		7	1	8
Jumlah Gol IV	0	1	4	0	9	1	15
Gol III/d				2	14	5	21
Gol III/c					2	2	4
Gol III/b					1	12	13
Gol III/a						9	9
Jumlah Gol III	0	0	0	2	17	28	47
Gol II/d						6	6
Gol II/c						3	3
Gol II/b							0
Gol II/a							0
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	9	9
JUMLAH	0	1	4	2	26	38	71

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Demikian Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (Audited) ini disusun dan dapat memberikan manfaat.

Padang, Mei 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2025
- Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2025
- Lampiran 3 LRA,LO, Neraca dan LPE Tahun 2025 dari aplikasi SIPD
- Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Lampiran 5 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan GU, TU, LS
- Lampiran 6 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan Jenis Belanja
- Lampiran 7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 10 Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 11 Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2025
- Lampiran 13 Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2025
- Lampiran 14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025
- Lampiran 15 Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2025
- Lampiran 16 Daftar Persediaan per 31 Desember 2025
- Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025
- Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2025
- Lampiran 19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2025
- Lampiran 20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 21 Daftar Belanja Modal Tahun 2025
- Lampiran 22 Daftar Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 23 Daftar Belanja Barang dan Jasa Yang Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025
- Lampiran 25 Register SP2D SKPD Tahun 2025
- Lampiran 27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- Lampiran 28 Jurnal Penyesuaian Tahun 2025

LAMPIRAN LAINNYA

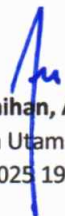
DAFTAR REALISASI SP2D,SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	TOTAL SP2D GU Rp.	3.400.688.260,00
2	TOTAL SP2D LS Rp.	13.299.575.814,00
3	TOTAL SP2D TU Rp.	-
4	JUMLAH SP2D (JUMLAH 1+2+3) Rp.	16.700.264.074,00
5	SPJ UYHD/ GU NIHIL Rp.	462.835.020,00
6	BELANJA KOTOR (JUMLAH 4+5) Rp.	17.163.099.094,00
7	TOTAL CP GU Rp.	-
8	TOTAL CP LS Rp.	-
9	TOTAL CP TU Rp.	-
10	TOTAL CP (JUMLAH 7+8+9) Rp.	-
	- Rp.	-
11	BELANJA BERSIH (SALDO 6-10) Rp.	17.163.099.094,00
12	UP Rp.	529.337.000,00
	Diterima tanggal 5 Februari 2025 Rp.	529.337.000,00
13	SPJ UYHD/GU NIHIL =NO.5 Rp.	462.835.020,00
14	SISA UYHD Rp.	66.501.980,00
	Penyetoran Sisa UYHD	66.501.980,00
	Tanggal 31 Desember 2025 Rp.	66.501.980,00

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN TAHUN 2025

No	BULAN	Jenis Pendapatan			JUMLAH
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-Lain PAD Yg Sah	
1	JANUARI	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

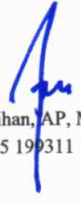


Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	18.931.696.909,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	18.853.900.909,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	11.185.076.922,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.932.726.009,00	5.864.870.962,00	98,86	6.025.716.423,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.253.666.436,00	4.217.815.560,00	99,16	4.343.762.683,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.253.666.436,00	4.217.815.560,00	99,16	4.343.762.683,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	413.636.824,00	407.716.160,00	98,57	430.757.724,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	413.636.824,00	407.716.160,00	98,57	430.757.724,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.310.000,00	135.290.000,00	93,75	149.920.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.310.000,00	135.290.000,00	93,75	149.920.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	362.520.000,00	358.380.000,00	98,86	339.309.690,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	362.520.000,00	358.380.000,00	98,86	339.309.690,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.585.000,00	92.495.000,00	98,84	122.910.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.585.000,00	92.495.000,00	98,84	122.910.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	218.701.460,00	216.246.120,00	98,88	228.485.100,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	218.701.460,00	216.246.120,00	98,88	228.485.100,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.853.330,00	61.624.482,00	99,63	54.387.286,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.853.330,00	61.624.482,00	99,63	54.387.286,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.128,00	48.802,00	81,16	52.918,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.128,00	48.802,00	81,16	52.918,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	348.976.236,00	340.622.500,00	97,61	320.624.679,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	348.976.236,00	340.622.500,00	97,61	320.624.679,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.854.085,00	8.658.022,00	97,79	8.876.542,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.854.085,00	8.658.022,00	97,79	8.876.542,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.562.510,00	25.974.316,00	97,79	26.629.801,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.562.510,00	25.974.316,00	97,79	26.629.801,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.820.195.200,00	5.692.993.444,00	97,81	4.945.880.499,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.158.415.965,00	4.070.745.797,00	97,89	3.457.574.564,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.158.415.965,00	4.070.745.797,00	97,89	3.457.574.564,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.661.779.235,00	1.622.247.647,00	97,62	1.488.305.935,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.661.779.235,00	1.622.247.647,00	97,62	1.488.305.935,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	213.480.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	213.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	213.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080,00	5.332.174.688,00	95,99	7.668.823.987,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.019.309.362,00	926.469.765,00	90,89	1.856.402.987,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.019.309.362,00	926.469.765,00	90,89	1.856.402.987,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.173.121,00	98.845.150,00	75,93	152.026.847,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.840.000,00	7.790.000,00	99,36	8.405.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.617.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.916.385,00	8.555.880,00	95,96	47.079.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.909.010,00	7.906.530,00	99,97	42.369.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	170.468.000,00	158.166.556,00	92,78	298.207.250,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.996.363,00	34.961.004,00	99,90	197.436.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	740.000,00	740.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.263.730,00	8.258.400,00	99,94	33.888.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.793.351,00	25.248.905,00	97,89	125.969.003,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.450.400,00	10.442.465,00	99,92	7.593.787,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	611.759.002,00	563.554.875,00	92,12	813.640.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	57.365.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	57.365.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.151.055.718,00	3.062.851.864,00	97,20	2.628.625.153,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.036.796.028,00	2.964.956.506,00	97,63	2.388.527.210,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	208.300.000,00	204.300.000,00	98,08	297.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	363.390.000,00	349.890.000,00	96,28	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.172.810,00	42.160.300,00	87,52	42.160.300,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	106.750.000,00	99.850.000,00	93,54	203.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	503.058.640,00	494.700.000,00	98,34	430.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	499.139.280,00	490.800.000,00	98,33	442.095.086,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	349.341.048,00	343.440.232,00	98,31	254.363.619,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	377.000.000,00	377.000.000,00	100,00	219.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.675.000,00	3.499.504,00	95,22	3.669.086,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.690.000,00	19.608.933,00	90,41	28.658.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	210.525.000,00	205.097.181,00	97,42	280.603.128,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.250.000,00	2.143.656,00	95,27	1.949.341,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	14.609.700,00	91,31	10.371.750,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	135.944.250,00	126.897.000,00	93,34	166.556.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.160.000,00	190.560.000,00	99,69	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	106.759.690,00	90.845.358,00	85,09	103.207.943,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	106.759.690,00	90.845.358,00	85,09	103.207.943,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	136.890.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	136.890.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000,00	7.050.000,00	94,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	7.050.000,00	94,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	343.100.000,00	303.362.649,00	88,42	466.729.676,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293.050.000,00	263.612.321,00	89,95	406.672.947,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200.000.000,00	193.833.761,00	96,92	336.012.497,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.500.000,00	19.759.260,00	77,49	9.848.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.150.000,00	17.172.500,00	81,19	27.072.950,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40.880.000,00	31.521.800,00	77,11	23.894.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.520.000,00	1.325.000,00	24,00	9.845.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.050.000,00	39.750.328,00	79,42	60.056.729,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.050.000,00	39.750.328,00	79,42	60.056.729,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.041.600.000,00	1.039.490.410,00	99,80	2.717.066.171,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.041.600.000,00	1.039.490.410,00	99,80	2.625.626.206,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.041.600.000,00	1.039.490.410,00	99,80	2.625.176.206,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	91.439.965,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa&Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	91.439.965,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	18.853.900.909,00
5.2	BELANJA MODAL	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	3.396.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	74.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	74.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	74.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	18.931.696.909,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.602.886.289,00)	(17.163.099.094,00)	97,50	(18.931.696.909,00)

Provinsi Sumatera Barat, Mei 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
NIP.19741025 199311 1 001



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025 (Audited)	2024 (audited)	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
8.1	BEBAN OPERASI	16.549.423.278,00	19.151.408.790,50	(2.601.985.512,50)	(13,59)
8.1.01	Beban Pegawai	11.164.364.880,00	11.553.833.553,00	(389.468.673,00)	(3,37)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.852.396.837,00	6.013.447.653,00	(161.050.816,00)	(2,68)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	4.217.815.560,00	4.343.762.683,00	(125.947.123,00)	(2,90)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.217.815.560,00	4.343.762.683,00	(125.947.123,00)	(2,90)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	407.716.160,00	430.757.724,00	(23.041.564,00)	(5,35)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	407.716.160,00	430.757.724,00	(23.041.564,00)	(5,35)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	135.290.000,00	149.920.000,00	(14.630.000,00)	(9,76)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	135.290.000,00	149.920.000,00	(14.630.000,00)	(9,76)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	358.380.000,00	315.639.850,00	42.740.150,00	13,54
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	358.380.000,00	315.639.850,00	42.740.150,00	13,54
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.495.000,00	122.910.000,00	(30.415.000,00)	(24,75)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	92.495.000,00	122.910.000,00	(30.415.000,00)	(24,75)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	216.246.120,00	228.485.100,00	(12.238.980,00)	(5,36)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	216.246.120,00	228.485.100,00	(12.238.980,00)	(5,36)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.624.482,00	53.603.197,00	8.021.285,00	14,96
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.624.482,00	53.603.197,00	8.021.285,00	14,96
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	48.802,00	52.918,00	(4.116,00)	(7,78)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	48.802,00	52.918,00	(4.116,00)	(7,78)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	328.148.375,00	332.809.838,00	(4.661.463,00)	(1,40)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	328.148.375,00	332.809.838,00	(4.661.463,00)	(1,40)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.658.022,00	8.876.542,00	(218.520,00)	(2,46)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.658.022,00	8.876.542,00	(218.520,00)	(2,46)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	25.974.316,00	26.629.801,00	(655.485,00)	(2,46)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	25.974.316,00	26.629.801,00	(655.485,00)	(2,46)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.311.968.043,00	5.326.905.900,00	(14.937.857,00)	(0,28)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.799.510.028,00	3.728.810.333,00	70.699.695,00	1,90
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.799.510.028,00	3.728.810.333,00	70.699.695,00	1,90
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.512.458.015,00	1.598.095.567,00	(85.637.552,00)	(5,36)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.512.458.015,00	1.598.095.567,00	(85.637.552,00)	(5,36)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	213.480.000,00	(213.480.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	213.480.000,00	(213.480.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	213.480.000,00	(213.480.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50	(2.212.516.839,50)	(29,12)
8.1.02.01	Beban Barang	972.165.579,00	1.832.025.062,00	(859.859.483,00)	(46,93)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	972.165.579,00	1.832.025.062,00	(859.859.483,00)	(46,93)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	2.440.000,00	(2.440.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.921.650,00	134.190.347,00	(23.268.697,00)	(17,34)
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.790.000,00	8.405.000,00	(615.000,00)	(7,32)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	7.217.000,00	(7.217.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.119.529,00	41.154.075,00	(22.034.546,00)	(53,54)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.184.855,00	39.601.000,00	(24.416.145,00)	(61,66)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	158.166.556,00	298.207.250,00	(140.040.694,00)	(46,96)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	61.461.804,00	194.144.800,00	(132.682.996,00)	(68,34)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.017.200,00	37.308.600,00	(32.291.400,00)	(86,55)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.766.645,00	127.393.203,00	(109.626.558,00)	(86,05)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	10.442.465,00	7.593.787,00	2.848.678,00	37,51
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	563.554.875,00	813.640.000,00	(250.085.125,00)	(30,74)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	57.365.000,00	(57.365.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	57.365.000,00	(57.365.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.070.039.760,00	2.581.754.328,50	488.285.431,50	18,91
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.964.752.806,00	2.383.983.161,00	580.769.645,00	24,36
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	204.300.000,00	297.500.000,00	(93.200.000,00)	(31,33)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	349.890.000,00	0,00	349.890.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	42.160.300,00	42.160.300,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	99.850.000,00	203.400.000,00	(103.550.000,00)	(50,91)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	494.700.000,00	430.000.000,00	64.700.000,00	15,05
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	490.800.000,00	442.095.086,00	48.704.914,00	11,02
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	343.440.232,00	254.363.619,00	89.076.613,00	35,02
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	377.000.000,00	219.000.000,00	158.000.000,00	72,15
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	3.439.504,00	3.528.961,00	(89.457,00)	(2,53)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	23.500.170,00	27.628.700,00	(4.128.530,00)	(14,94)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	201.062.244,00	277.229.404,00	(76.167.160,00)	(27,47)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.143.656,00	1.949.341,00	194.315,00	9,97
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.609.700,00	10.371.750,00	4.237.950,00	40,86
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	126.897.000,00	166.556.000,00	(39.659.000,00)	(23,81)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	190.560.000,00	0,00	190.560.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	98.236.954,00	60.881.167,50	37.355.786,50	61,36
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	98.236.954,00	60.881.167,50	37.355.786,50	61,36
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	136.890.000,00	(136.890.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	0,00	136.890.000,00	(136.890.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	100,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	303.362.649,00	466.729.676,00	(163.367.027,00)	(35,00)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.612.321,00	406.672.947,00	(143.060.626,00)	(35,18)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	193.833.761,00	336.012.497,00	(142.178.736,00)	(42,31)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.759.260,00	9.848.500,00	9.910.760,00	100,63
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.172.500,00	27.072.950,00	(9.900.450,00)	(36,57)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31.521.800,00	23.894.000,00	7.627.800,00	31,92
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.325.000,00	9.845.000,00	(8.520.000,00)	(86,54)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.750.328,00	60.056.729,00	(20.306.401,00)	(33,81)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	39.750.328,00	60.056.729,00	(20.306.401,00)	(33,81)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.039.490.410,00	2.717.066.171,00	(1.677.575.761,00)	(61,74)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.039.490.410,00	2.625.626.206,00	(1.586.135.796,00)	(60,41)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.039.490.410,00	2.625.176.206,00	(1.585.685.796,00)	(60,40)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	91.439.965,00	(91.439.965,00)	(100,00)
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	91.439.965,00	(91.439.965,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16.549.423.278,00	19.151.408.790,50	(2.601.985.512,50)	(13,59)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96	(89.689.869,44)	(8,19)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	533.335.538,28	616.029.407,84	(82.693.869,56)	(13,42)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	1.485.000,00	4.358.749,92	(2.873.749,92)	(65,93)
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	0,00	2.873.749,92	(2.873.749,92)	(100,00)
8.1.08.01.01.0002	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	54.636.828,12	54.636.828,12	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.491.250,04	50.491.250,04	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.145.578,08	4.145.578,08	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.782.199,96	16.176.769,92	(394.569,96)	(2,44)
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	15.782.199,96	15.782.199,96	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0005	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	394.569,96	(394.569,96)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	162.632.275,56	161.477.963,48	1.154.312,08	0,71
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	24.488.400,00	13.570.759,88	10.917.640,12	80,45
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	46.487.400,36	46.487.398,44	1,92	0,00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	787.675,80	787.675,80	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	58.804.999,92	58.804.999,80	0,12	0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.839.999,92	22.623.329,88	(7.783.329,96)	(34,40)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10.418.999,64	10.418.999,64	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.596.800,00	5.596.800,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.207.999,92	3.188.000,04	(1.980.000,12)	(62,11)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	198.460.000,08	211.772.860,92	(13.312.860,84)	(6,29)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	560.000,04	(560.000,04)	(100,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	198.000.000,00	209.951.345,88	(11.951.345,88)	(5,69)
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	460.000,08	459.999,96	0,12	0,00
8.1.08.01.06.0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	0,00	801.515,04	(801.515,04)	(100,00)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	350.000,04	350.000,04	0,00	0,00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	350.000,04	350.000,04	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	99.989.234,52	167.256.235,44	(67.267.000,92)	(40,22)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	85.000.734,36	140.047.860,24	(55.047.125,88)	(39,31)
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.358.750,04	11.058.625,08	(9.699.875,04)	(87,71)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.629.750,12	13.629.750,12	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.524.145,24	478.520.145,12	(6.995.999,88)	(1,46)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	471.524.145,24	478.520.145,12	(6.995.999,88)	(1,46)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	471.524.145,24	478.520.145,12	(6.995.999,88)	(1,46)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96	(89.689.869,44)	(8,19)
	JUMLAH BEBAN	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)	2.691.675.381,94	(13,29)

Provinsi Sumatera Barat, Mei 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Dr. Zefnihan, AP, M.Si
NIP.19741025 199311 1 001

Kode Rekening	Uraian	2025 (Audited)	2024(Audited)
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.622.549.631,00	3.622.549.631,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	932.176.249,00	932.176.249,00
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	2.458.500,00	2.458.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	3.938.379,00	3.938.379,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.234.290.700,00	1.234.290.700,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.298.818.653,00	1.298.818.653,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	150.867.150,00	150.867.150,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.153.170.500,00	1.153.170.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	565.796.000,00	565.796.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	89.333.800,00	89.333.800,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	35.521.200,00	35.521.200,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	13.612.500,00	13.612.500,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	39.600.000,00	39.600.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	409.307.000,00	409.307.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.497.581.480,00	1.470.540.680,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	1.377.606.430,00	1.350.565.630,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	89.997.900,00	89.997.900,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	1.287.608.530,00	1.260.567.730,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	98.259.900,00	98.259.900,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	85.459.900,00	85.459.900,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	10.500.000,00	10.500.000,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	21.715.150,00	21.715.150,00
1.3.02.06.03.0019	Switcher Antena	21.715.150,00	21.715.150,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.750.000,00	40.750.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	25.750.000,00	25.750.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	1.750.000,00	1.750.000,00
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.950.000,00	1.950.000,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.950.000,00	1.950.000,00
1.3.02.08.09.0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.950.000,00	1.950.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	4.704.000,00	4.704.000,00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4.704.000,00	4.704.000,00
1.3.02.09.04.0007	Alsus Fotografi Kepolisian	4.704.000,00	4.704.000,00
1.3.02.10	Komputer	7.572.327.823,00	7.299.267.823,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	5.210.367.073,00	4.937.307.073,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	1.588.672.376,00	1.588.672.376,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.621.694.697,00	3.348.634.697,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	2.361.960.750,00	2.361.960.750,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	44.581.929,00	44.581.929,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	318.350.450,00	318.350.450,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	115.044.753,00	115.044.753,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.883.983.618,00	1.883.983.618,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	44.926.370,00	44.926.370,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	44.486.370,00	44.486.370,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	24.952.500,00	24.952.500,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	601.500,00	601.500,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	5.818.400,00	5.818.400,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	8.738.170,00	8.738.170,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	1.060.500,00	1.060.500,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	459.000,00	459.000,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.140.600,00	2.140.600,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	219.000,00	219.000,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	496.700,00	496.700,00
1.3.05.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	440.000,00	440.000,00
1.3.05.01.06.0001	Three Dimensional Artifacts and Realita	440.000,00	440.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(24.211.276.524,36)	(23.186.418.635,84)

Kode Rekening	Uraian	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.949.647.301,00)	(17.389.317.558,52)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(299.904.500,00)	(298.419.500,28)
1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(184.937.500,00)	(184.937.500,28)
1.3.07.01.01.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(11.880.000,00)	(10.395.000,00)
1.3.07.01.01.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(2.975.000,00)	(2.975.000,00)
1.3.07.01.01.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	(10.725.000,00)	(10.725.000,00)
1.3.07.01.01.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	(89.387.000,00)	(89.387.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.877.768.868,32)	(2.823.132.040,52)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.683.059.556,00)	(2.632.568.306,28)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(178.009.312,32)	(173.863.734,24)
1.3.07.01.02.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(16.700.000,00)	(16.700.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(469.640.349,80)	(453.858.149,64)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(78.910.999,80)	(63.128.799,84)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(40.989.500,00)	(40.989.500,00)
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(1.972.850,00)	(1.972.849,80)
1.3.07.01.03.0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	(255.750.000,00)	(255.750.000,00)
1.3.07.01.03.0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(14.400.000,00)	(14.400.000,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(67.867.000,00)	(67.867.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(9.750.000,00)	(9.750.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(15.148.000,00)	(15.148.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(15.148.000,00)	(15.148.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.837.128.779,28)	(5.674.543.099,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(8.965.000,00)	(8.965.000,00)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(55.418.000,00)	(55.418.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(456.235.600,00)	(456.235.600,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(668.270.200,16)	(643.828.399,36)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(880.099.448,84)	(833.612.047,48)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(2.458.500,00)	(2.458.500,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.363.027,40)	(1.575.351,60)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.184.290.700,48)	(1.125.485.699,28)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.277.018.652,88)	(1.262.178.652,56)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(150.867.150,00)	(150.867.150,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(564.975.999,84)	(554.556.998,60)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(89.333.800,00)	(83.737.000,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(35.521.200,00)	(35.521.200,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(13.612.500,00)	(13.612.500,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(39.600.000,00)	(39.600.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(408.098.999,68)	(406.891.000,12)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.100.661.480,24)	(875.160.679,32)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(89.997.900,00)	(89.997.900,20)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(891.608.530,00)	(666.567.729,88)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(85.459.900,00)	(85.459.900,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(10.500.000,00)	(10.500.000,00)
1.3.07.01.06.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(1.380.000,24)	(919.999,92)
1.3.07.01.06.0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	(21.715.150,00)	(21.715.149,32)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(40.050.000,12)	(39.700.000,08)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1.050.000,12)	(700.000,08)
1.3.07.01.07.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)
1.3.07.01.07.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1.950.000,00)	(1.950.000,00)
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(1.950.000,00)	(1.950.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(7.307.395.323,24)	(7.207.406.089,68)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(1.588.672.376,00)	(1.588.672.376,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(3.360.012.197,00)	(3.275.011.463,12)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(44.581.929,00)	(44.581.929,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(318.350.450,00)	(316.991.700,28)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(111.794.753,24)	(98.165.003,28)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.883.983.618,00)	(1.883.983.618,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.261.629.223,36)	(5.797.101.077,32)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.261.629.223,36)	(5.797.101.077,32)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(6.261.629.223,36)	(5.797.101.077,32)
	JUMLAH ASET TETAP	22.724.665.655,64	23.449.422.744,16

Kode Rekening	Uraian	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
1.5.04	Aset Lain-lain	548.481.000,00	548.481.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	548.481.000,00	548.481.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	548.481.000,00	548.481.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	548.481.000,00	548.481.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.749.083.432,00)	(1.749.083.432,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.749.083.432,00)	(1.749.083.432,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.749.083.432,00)	(1.749.083.432,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.749.083.432,00)	(1.749.083.432,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(548.481.000,00)	(548.481.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(548.481.000,00)	(548.481.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(548.481.000,00)	(548.481.000,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(548.481.000,00)	(548.481.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	22.806.320.813,64	23.584.165.312,16
2	KEWAJIBAN	22.645.962,00	416.266.988,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.645.962,00	416.266.988,00
2.1.06	Utang Belanja	22.645.962,00	416.266.988,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	393.499.526,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	12.474.125,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	12.474.125,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	381.025.401,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	271.235.769,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	109.789.632,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	22.645.962,00	22.767.462,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	22.645.962,00	22.767.462,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	263.292,00	263.292,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	5.914.437,00	2.001.000,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	16.468.233,00	20.503.170,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.645.962,00	416.266.988,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	22.645.962,00	416.266.988,00
3	EKUITAS	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16
3.1	EKUITAS	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16
3.1.01	Ekuitas	5.620.575.757,64	4.236.201.415,16
3.1.01.01	Ekuitas	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
3.1.01.01.01	Ekuitas	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
3.1.03.01	RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
	JUMLAH EKUITAS	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.806.320.813,64	23.584.165.312,16

Provinsi Sumatera Barat, Mei 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Zefnihan, AP, M.Si
NIP.19741025 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	6.995.999,20	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.995.999,20	0,00
LAIN-LAIN	(35.604,20)	(532.085,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	0,28	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,32	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(0,20)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.599,20	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1,28)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(0,40)	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1,60)	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,36	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,20	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(0,12)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(0,24)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	(0,68)	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,48	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,32	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,16	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	(60.000,00)	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	(22.200,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Provinsi Sumatera Barat, Mei 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Dr.. ZEFNIHAN, AP, M.Si
NIP.19741025 199311 1 001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA
PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

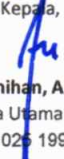
Kode Rekening										URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1										2	3	4	5	6
5.01.01										BELANJA	17.602.886.289	17.163.099.094	439.787.195	97,50
5.01.01										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	16.209.768.037	15.845.353.219	364.414.818	97,75
5.01.01	1	01								KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-	-	-	
5.01.01	1	01	01							PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	
5.01.01	1	01	01	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.01	1	01	06							KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	
5.01.01	1	01	02	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.01	1	01	06							EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-	-	-	
5.01.01	1	01	02	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.01	1	02								KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.944.081.209	11.748.424.406	195.656.803	98,36
5.01.01	1	02	01							PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN	11.752.921.209	11.557.864.406	195.056.803	98,34
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	01	0001		Belanja Gaji Pokok PNS	4.253.666.436	4.217.815.560	35.850.876	99,16
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	02	0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	413.636.824	407.716.160	5.920.664	98,57
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	03	0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.310.000	135.290.000	9.020.000	93,75
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	04	0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	362.520.000	358.380.000	4.140.000	98,86
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	05	0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.585.000	92.495.000	1.090.000	98,84
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	06	0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	218.701.460	216.246.120	2.455.340	98,88
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	07	0001		Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	61.853.330	61.624.482	228.848	99,63
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	08	0001		Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS	60.128	48.802	11.326	81,16
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	09	0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	348.976.236	340.622.500	8.353.736	97,61
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	10	0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.854.085	8.658.022	196.063	97,79
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	11	0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.562.510	25.974.316	588.194	97,79
5.01.01	1	02	01	5.1	01	01	12	0112		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	-	-	-	
5.01.01	1	02	01	5.1	01	02	01	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	4.158.415.965	4.070.745.797	87.670.168	97,89
5.01.01	1	02	01	5.1	02	03	01	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.661.779.235	1.622.247.647	39.531.588	97,62
5.01.01	1	02	02							PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	191.160.000	190.560.000	600.000	99,69
5.01.01	1	02	02	5.1	02	02	01	0080		Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.160.000	190.560.000	600.000	99,69
5.01.01	1	02	07							KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	-	-	-	
5.01.01	1	02	07	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.01	1	02	07	5.1	02	01	01	0071		Belanja Lembur	-	-	-	
5.01.01	1	03								KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	106.759.690	90.845.358	15.914.332	85,09
5.01.01	1	03	02							PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	106.759.690	90.845.358	15.914.332	85,09
5.01.01	1	03	02	5.1	02	02	02	0008		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	106.759.690	90.845.358	15.914.332	85,09
5.01.01	1	05								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.500.000	7.050.000	450.000	94,00
5.01.01	1	05	04							BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANG	7.500.000	7.050.000	450.000	94,00
5.01.01	1	05	04	5.1	02	02	12	0001		Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	7.500.000	7.050.000	450.000	94,00
5.01.01	1	06								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.836.825.360	1.786.201.300	50.624.060	97,24
5.01.01	1	06	01							PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.263.730	8.258.400	5.330	99,94
5.01.01	1	06	01	5.1	02	01	01	0031		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.263.730	8.258.400	5.330	99,94
5.01.01	1	06	03							PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.965.700	8.800.000	165.700	98,15
5.01.01	1	06	03	5.1	02	01	01	0030		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	740.000	740.000	-	100,00
5.01.01	1	06	03	5.1	02	01	01	0036		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.225.700	8.060.000	165.700	97,99
5.01.01	1	06	04							PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.354.809	95.640.784	4.714.025	95,30
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0009		Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.840.000	7.790.000	50.000	99,36
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0012		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	8.916.385	8.555.880	360.505	95,96
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.909.010	7.906.530	2.480	99,97
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0027		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	-	100,00
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	34.996.363	34.961.004	35.359	99,90
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0036		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.567.651	17.188.905	378.746	97,84
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0043		Belanja Natura-Pakan Natura	10.450.400	10.442.465	7.935	99,92
5.01.01	1	06	04	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.675.000	6.796.000	3.879.000	63,66

Kode Rekening										URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1										2	3	4	5	6
5.01.01	1	06	05							PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	170.468.000	158.166.556	12.301.444	92,78
5.01.01	1	06	05	5.1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	170.468.000	158.166.556	12.301.444	92,78
5.01.01	1	06	09							PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.171.773.121	1.138.335.560	33.437.561	97,15
5.01.01	1	06	09	5.1	02	01	01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.173.121	98.845.150	31.327.971	75,93
5.01.01	1	06	09	5.1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.041.600.000	1.039.490.410	2.109.590	99,80
5.01.01	1	06	09	5.1	02	04	02	0001		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	
5.01.01	1	06	11							DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	377.000.000	377.000.000	-	100,00
5.01.01	1	06	11	5.1	02	02	01	0039		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	377.000.000	377.000.000	-	100,00
5.01.01	1	07								PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	294.900.000	273.060.000	21.840.000	92,59
5.01.01	1	07	07							PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	294.900.000	273.060.000	21.840.000	92,59
5.01.01	1	07	07	5.2	02	06	01	0006		Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	
5.01.01	1	07	07	5.2	02	10	01	0002		Belanja Modal Personal Computer	294.900.000	273.060.000	21.840.000	92,59
										Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	
5.01.01	1	07	05							PENGADAAN MEBEL	-	-	-	
5.01.01	1	07	05	5.2	02	05	01	0001		Belanja Modal Mebel	-	-	-	
5.01.01	1	08								PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.656.601.778	1.617.899.806	38.701.972	97,66
5.01.01	1	08	02							PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	238.140.000	230.349.274	7.790.726	96,73
5.01.01	1	08	02	5.1	02	02	01	0059		Belanja Tagihan Telepon	3.675.000	3.499.504	175.496	95,22
5.01.01	1	08	02	5.1	02	02	01	0060		Belanja Tagihan Air	21.690.000	19.608.933	2.081.067	90,41
5.01.01	1	08	02	5.1	02	02	01	0061		Belanja Tagihan Listrik	210.525.000	205.097.181	5.427.819	97,42
5.01.01	1	08	02	5.1	02	02	01	0063		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan	2.250.000	2.143.656	106.344	95,27
5.01.01	1	08	04							PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.418.461.778	1.387.550.532	30.911.246	97,82
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.172.810	42.160.300	6.012.510	87,52
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0029		Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.750.000	20.350.000	2.400.000	89,45
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0030		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	499.058.640	490.800.000	8.258.640	98,35
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	499.139.280	490.800.000	8.339.280	98,33
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0033		Belanja Jasa Tenaga Supir	349.341.048	343.440.232	5.900.816	98,31
5.01.01	1	08	04	5.1	02	02	01	0047		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	
5.01.01	1	09								PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	363.100.000	321.872.349	41.227.651	88,65
5.01.01	1	09	02							PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	216.000.000	208.443.461	7.556.539	96,50
5.01.01	1	09	02	5.1	02	02	01	0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16.000.000	14.609.700	1.390.300	91,31
5.01.01	1	09	02	5.1	02	03	02	0036		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	200.000.000	193.833.761	6.166.239	96,92
5.01.01	1	09	06							PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	55.900.000	37.991.800	17.908.200	67,96
5.01.01	1	09	06	5.1	02	03	02	0117		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.500.000	5.145.000	4.355.000	54,16
5.01.01	1	09	06	5.1	02	03	02	0405		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40.880.000	31.521.800	9.358.200	77,11
5.01.01	1	09	06	5.1	02	03	02	0411		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.520.000	1.325.000	4.195.000	24,00
5.01.01	1	09	10							PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	54.050.000	43.650.328	10.399.672	80,76
5.01.01	1	09	06	5.1	02	02	01	0030		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000	3.900.000	100.000	97,50
5.01.01	1	09	10	5.2	03	01	01	0001		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	
5.01.01	1	09	10	5.1	02	03	03	0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.050.000	39.750.328	10.299.672	79,42
5.01.01	1	09	09							PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	37.150.000	31.786.760	5.363.240	85,56
5.01.01	1	09	09	5.1	02	03	02	0117		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.000.000	14.614.260	1.385.740	91,34
5.01.01	1	09	09	5.1	02	03	02	0121		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.150.000	17.172.500	3.977.500	81,19
5.01.02										PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	766.461.262	748.050.050	18.411.212	97,60
5.01.02	1	01								KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	611.922.279	596.219.550	15.702.729	97,43
5.01.02	1	01	06							KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	611.922.279	596.219.550	15.702.729	97,43
5.01.02	1	01	06	5.1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.027.279	193.266.550	4.760.729	97,60
5.01.02	1	01	06	5.1	02	02	01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	54.750.000	54.750.000	-	100,00
5.01.02	1	01	06	5.1	02	02	01	0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	298.620.000	294.120.000	4.500.000	98,49

Kode Rekening										URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1										2		3	4	5	6
5.01.02	1	01	06	5.1	02	01	0007			Honorarium Rohaniwan		400.000	400.000	-	100,00
5.01.02	1	01	06	5.1	02	01	0029			Belanja Jasa Tenaga Ahli		12.000.000	12.000.000	-	100,00
5.01.02	1	01	06	5.1	02	01	0071			Belanja Lembur		48.125.000	41.683.000	6.442.000	86,61
5.01.02	1	01	06	5.1	02	02	05043			Belanja Sewa Hotel			-	-	
5.01.01	1	06	05	5.1	02	01	010026			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			-	-	
5.01.02	1	02								ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		91.800.000	90.193.700	1.606.300	98,25
5.01.02	1	02	01							ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		91.800.000	90.193.700	1.606.300	98,25
5.01.02	1	02	01	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		79.300.000	77.693.700	1.606.300	97,97
5.01.02	1	02	01	5.1	02	02	010003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		12.500.000	12.500.000	-	100,00
5.01.02	1	03								PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		62.738.983	61.636.800	1.102.183	98,24
5.01.02	1	03	04							FASILITASI / EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB/ KOTA		62.738.983	61.636.800	1.102.183	98,24
5.01.02	1	03	04	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		56.438.983	56.403.800	35.183	99,94
5.01.02	1	01	06	5.1	02	02	010071			Belanja Lembur		6.300.000	5.233.000	1.067.000	83,06
5.01.03										PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		626.656.990	569.695.825	56.961.165	90,91
5.01.03	1	01								KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		289.806.000	270.968.500	18.837.500	93,50
5.01.03	1	01	01							KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		74.314.000	71.160.000	3.154.000	95,76
5.01.03	1	01	01	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.714.000	16.690.000	24.000	99,86
5.01.03	1	01	01	5.1	02	02	010003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		3.050.000	3.000.000	50.000	98,36
				01	5.1	02	02	010003		Belanja Jasa Tenaga Ahli		24.000.000	21.000.000	3.000.000	87,50
				01	5.1	02	02	010071		Belanja Lembur		30.550.000	30.470.000	80.000	99,74
				01	5.1	02	02	050009		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		-	-	-	
5.01.03	1	01	02							ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN		6.232.000	6.230.000	2.000	99,97
5.01.03	1	01	03	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.232.000	6.230.000	2.000	99,97
5.01.03	1	01	03							PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN		-	-	-	
5.01.03	1	01	02	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		0	-	-	
5.01.03	1	01	04							KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN		23.677.000	10.993.500	12.683.500	46,43
5.01.03	1	01	04	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.677.000	10.993.500	12.683.500	46,43
5.01.03	1	01	05							KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		33.650.000	32.108.000	1.542.000	95,42
5.01.03	1	01	05	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-	-	-	
				05	5.1	02	02	010029		Belanja Jasa Tenaga Ahli		12.000.000	10.500.000	1.500.000	87,50
5.01.03	1	01	05	5.1	02	02	010071			Belanja Lembur		21.650.000	21.608.000	42.000	99,81
5.01.03	1	01	06							ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		12.383.000	12.241.000	142.000	98,85
5.01.03	1	01	06	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.383.000	12.241.000	142.000	98,85
5.01.03	1	01	07							PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		-	-	-	
5.01.03	1	01	07	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-	-	-	
5.01.03	1	01	08							KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		139.550.000	138.236.000	1.314.000	99,06
5.01.03	1	01	08	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		33.550.000	32.236.000	1.314.000	96,08
5.01.03	1	01	08	5.1	02	02	010003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		106.000.000	106.000.000	-	100,00
5.01.03	1	02								KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA		170.278.750	145.607.025	24.671.725	85,51
5.01.03	1	02	01							KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		38.615.000	38.403.300	211.700	99,45
5.01.03	1	02	01	5.1	02	01	010052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.100.000	7.927.300	172.700	97,87
				01	5.1	02	02	010029		Belanja Jasa Tenaga Ahli		24.000.000	24.000.000	-	100,00
				01	5.1	02	02	010071		Belanja Lembur		6.515.000	6.476.000	39.000	99,40

Kode Rekening									URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1									2	3	4	5	6
5.01.03	1	02	02						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	23.488.000	22.691.400	796.600	96,61
5.01.03	1	02	02	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.488.000	22.691.400	796.600	96,61
5.01.03	1	02	03						PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	
5.01.03	1	02	03	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.03	1	02	04						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	43.821.500	38.982.000	4.839.500	88,96
5.01.03	1	02	04	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.716.500	9.669.000	1.047.500	90,23
5.01.03	1	01	08	5.1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.400.000	7.100.000	3.300.000	68,27
5.01.03	1	01	08	5.1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.850.000	17.850.000	-	100,00
5.01.03	1	02	04	5.1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	
5.01.03	1	02	04	5.1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	4.855.000	4.363.000	492.000	89,87
5.01.03	1	02	05						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	11.075.000	10.028.925	1.046.075	90,55
5.01.03	1	02	05	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.575.000	4.403.925	171.075	96,26
5.01.03	1	02	05	5.1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	6.500.000	5.625.000	875.000	86,54
5.01.03	1	02	05	5.1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	
5.01.03	1	02	06						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	22.265.500	21.944.400	321.100	98,56
5.01.03	1	02	06	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.265.500	21.944.400	321.100	98,56
5.01.03	1	02	07						PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	-	-	-	#DIV/0!
5.01.03	1	02	07	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.03	1	02	08						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	31.013.750	13.557.000	17.456.750	43,71
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.698.500	6.250.000	17.448.500	26,37
5.01.03	1	02	04	5.1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	7.315.250	7.307.000	8.250	99,89
5.01.03	1	03							KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	166.572.240	153.120.300	13.451.940	91,92
5.01.03	1	03	01						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	14.397.000	13.775.700	621.300	95,68
5.01.03	1	03	01	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.763.000	7.493.700	269.300	96,53
5.01.03	1	03	01	5.1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.500.000	2.150.000	350.000	86,00
5.01.03	1	02	05	5.1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	-	-	
5.01.03	1	03	01	5.1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	4.134.000	4.132.000	2.000	99,95
5.01.03	1	03	02						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	22.507.240	21.692.800	814.440	96,38
5.01.03	1	03	02	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.507.240	21.692.800	814.440	96,38
5.01.03	1	03	03						PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	-	-	-	#DIV/0!
5.01.03	1	03	03	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.03	1	03							KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	15.038.000	14.244.400	793.600	94,72
5.01.03	1	03	04	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.038.000	14.244.400	793.600	94,72
5.01.03	1	03	05						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	13.708.000	13.380.400	327.600	97,61
5.01.03	1	03	05	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.708.000	1.380.400	327.600	80,82
5.01.03	1	02	05	5.1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	-	-	-	
5.01.03	1	02	05	5.1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000	12.000.000	-	100,00
5.01.03	1	03	05	5.1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	-	-	-	
5.01.03	1	03	07						PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	-	-	-	
5.01.03	1	03	07	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
5.01.03	1	03	08						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	100.922.000	90.027.000	10.895.000	89,20

Kode Rekening									URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1									2	3	4	5	6
5.01.03	1	03	08	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.902.000	33.307.000	1.595.000	95,43
5.01.03	1	03	08	5.1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19.100.000	18.800.000	300.000	98,43
5.01.03	1	03	08	5.1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.920.000	37.920.000	9.000.000	80,82

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,

 Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU/TU/LS TAHUN 2025

No	URAIAN/ OBJEK BELANJA	GU (Rp.)	TU (Rp.)	LS (Rp.)	JUMLAH
1	JANUARI				
a		-	-	-	-
2	FEBRUARI				
a		-	-	-	-
3	MARET				
a		-	-	-	-
4	APRIL				
a		-	-	-	-
5	MEI				
a		-	-	-	-
6	JUNI				
a		-	-	-	-
7	JULI				
a		-	-	-	-
8	AGUSTUS				
a		-	-	-	-
9	SEPTEMBER				
a		-	-	-	-
10	OKTOBER				
a		-	-	-	-
11	NOVEMBER				
a					
12	DESEMBER				
a					
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111 001

DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2025

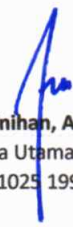
No	Uraian / Objek Belanja	B. Pegawai	B.Barang & Jasa	Belanja Modal				
				Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln,Irigasi & Jaringan	Asep Tetap Lainnya
1	JANUARI							
a		-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI							
a		-	-	-	-	-	-	-
3	MARET							
a		-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL							
a		-	-	-	-	-	-	-
5	MEI							
a		-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI							
a								
7	JULI							
a		-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS							
a		-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER							
a		-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER							
a		-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER							
a		-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER							
a								
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Jenis Pajak	Jumlah Piutang per 31 Des 2025	Umur Piutang				Penyisihan
			< 1 th 0,5%	1-2 th 10%	>2 sd 5 Th 50%	> 5 th 100%	
1	PPN	-	-	-	-	-	-
2	PPH PsI 21	-	-	-	-	-	-
3	PPH PsI 22	-	-	-	-	-	-
4	PPH PsI 23	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025

No	Kelompok Piutang / Nama Debitur	Jumlah Piutang per 31 Des 2025	Umur Piutang				Penyisihan
			< 1 Bln 0,5%	1-3 Bln 10%	3-12 Bln 50%	> 12 Bln 100%	
1	Nihil	-	-	-	-	-	-

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025

No	Kelompok Piutang / Nama Debitur	Jumlah Piutang per 31 Des 2025	Umur Piutang				Penyisihan
			< 1 Bln 0,5%	1-3 Bln 10%	3-12 Bln 50%	> 12 Bln 100%	
1	Nihil	-	-	-	-	-	-

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2025
(Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)

No	Uraian	Jml Pendapatan LRA	Jml Pendapatan LO	Jml Pendapatan Diterima Dimuka
		Rp.	Rp.	Rp.
1	NIHIL	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER,
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025199311 1 001

DAFTAR BEBAN BAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2025

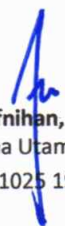
No	Uraian	Jml Belanja LRA	Jml beban LO	Jml Beban Bayar Dimuka	Ket: Beban Pegawai atau Beban Brg Jasa
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Asuransi BMD		8.778.707	-	Barang dan Jasa
2	Asuransi BMD	-	41.613.086	-	Barang dan Jasa
3	Asuransi BMD	53.699.620	44.749.683	8.949.937	Barang dan Jasa
3	Asuransi BMD	37.145.738	3.095.478	34.050.260	Barang dan Jasa
	JUMLAH	90.845.358	98.236.954	43.000.197	

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si

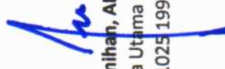
Pembina Utama Madya

NIP. 19741025 199311 1 001

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Bulan	Penerimaan					Penyetoran					Sisa
		PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	Jumlah	PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	Jumlah	
		3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	
1	2											13=7-12
1	Januari	-	1.042.616,00	-	-	1.042.616,00	-	1.042.616,00	-	-	1.042.616	0
2	Februari	-	39.594.656,00	649.995,00	-	40.244.651,00	-	39.594.656,00	649.995,00	-	40.244.651	0
3	Maret	3.947.011,00	93.483.563,00	535.367,00	471.657,00	98.437.598,00	3.947.011,00	93.483.563,00	535.367,00	471.657,00	98.437.598	0
4	April	2.030.487,00	38.220.045,00	793.155,00	232.781,00	41.276.468,00	2.030.487,00	38.220.045,00	793.155,00	232.781,00	41.276.468	0
5	Mei	1.768.715,00	69.451.206,00	79.751,00	225.251,00	71.524.923,00	1.768.715,00	69.451.206,00	79.751,00	225.251,00	71.524.923	0
6	Juni	11.786.435,00	94.181.509,00	1.215.583,00	2.250.675,00	109.434.202,00	11.786.435,00	94.181.509,00	1.215.583,00	2.250.675,00	109.434.202	0
7	Juli	2.286.202,00	38.036.686,00	136.306,00	1.161.628,00	41.620.822,00	2.286.202,00	38.036.686,00	136.306,00	1.161.628,00	41.620.822	0
8	Agustus	5.781.548,00	36.431.639,00	514.191,00	573.321,00	43.300.699,00	5.781.548,00	36.431.639,00	514.191,00	573.321,00	43.300.699	0
9	September	3.933.394,00	36.435.147,00	79.200,00	1.121.948,00	41.569.689,00	3.933.394,00	36.435.147,00	79.200,00	1.121.948,00	41.569.689	0
10	Oktober	4.783.386,00	79.285.013,00	524.558,00	1.077.525,00	85.670.482,00	4.783.386,00	79.285.013,00	524.558,00	1.077.525,00	85.670.482	0
11	November	8.683.636,00	44.988.531,00	609.521,00	3.010.553,00	57.292.241,00	8.683.636,00	44.988.531,00	609.521,00	3.010.553,00	57.292.241	0
12	Desember	38.373.921,00	73.579.127,00	4.996.467,00	1.841.716,00	118.791.231,00	38.373.921,00	73.579.127,00	4.996.467,00	1.841.716,00	118.791.231	0
	Total	83.374.735,00	644.729.738,00	10.134.094,00	11.967.055,00	750.205.622,00	83.374.735,00	644.729.738,00	10.134.094,00	11.967.055,00	750.205.622	0

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefrihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR UTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Pihak Ketiga/PNS	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	PT. Telkom	Pemakaian Telepon Desember 2025		263.292,00		263.292,00
2	PT. PLN	Pemakaian Listrik Desember 2025		16.468.233,00		16.468.233,00
3	PDAM	Pemakaian Air November dan Desember 2025		5.914.437,00		5.914.437,00
	JUMLAH		-	22.645.962,00	-	22.645.962,00

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2025

No	NAMA	SIP		Sewa/bulan	Penyeteroran			Piutang Sewa	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
		No	Tgl		Tg	Rp	Nama Penyeteror		
1	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH								

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025

No	KAB/KOTA	PLAFON	Pembayaran s/d 2024	Pembayaran Tahun 2025	Jumlah Pembayaran	Tunggakan	Umur Piutang										Penyisihan			
							<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	>10	
	N I H I L	-	-	-	-	-														-
	Jumlah	-	-	-	-	-														-

Padang, Mei 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
PPembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai (Rp)			
					Barang Pakai Habis`	Bahan Material	Barang Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Bahan Pakai Habis				35.413.761			38.654.961
1)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Bakar Minyak				5.760.000			5.760.000
1	BBM	liter	450	12.800	5.760.000			5.760.000
2)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK				3.792.426			3.792.426
1	Memo Stick	Pcs	33	6.660	219.780			219.780
2	Pembatas Kertas	Pcs	64	7.215	461.760			461.760
3	Stempel 111	Pcs		73.260	-			-
4	Pena Boldliner	Lusin	1	210.900	210.900			210.900
5	Buku Ekspedisi	Pcs		15.540	-			-
6	Penggaris Besi 30 cm	Pcs	2	8.325	16.650			16.650
7	Trigonal Clip No 5	Kotak	40	5.550	222.000			222.000
8	Whiteboard Magnetic uk 60x40	Pcs		105.450	-			-
9	Gunting Kertas	Pcs	1	13.320	13.320			13.320
10	Logitech R400	Pcs	2	210.900	421.800			421.800
11	Pena Dong a	Lusin	4	67.599	270.396			270.396
12	Brief Ordiner	Lusin	3	485.070	1.455.210			1.455.210
13	trigonal Clip No 3	Kotak	80	2.886	230.880			230.880
14	Anak Hecter	Pcs	10	26.973	269.730			269.730
3)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				3.343.875			3.343.875
1	Kertas HVS 75 gr f4	Rim	43	52.170	2.243.310			2.243.310
2	Kerts NCR Merah	Rim	2	57.165	114.330			114.330
3	Kertas NCR Kuning	Rim	2	57.165	114.330			114.330
4	Kertas HVS 75 gr A4	Rim	15	50.505	757.575			757.575
5	Kertas NCR Putih	Rim	2	57.165	114.330			114.330
4)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				-			-
5)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				12.731.700			12.731.700
2	tinta printer 003 yello	Botol	2	97.680	195.360			195.360
5	Toner 83 a	Pcs	3	1.082.250	3.246.750			3.246.750
6	tinta printer bt 5000 bk	Botol	2	133.200	266.400			266.400
7	Toner 79 a	Pcs	3	982.350	2.947.050			2.947.050
9	tinta printer gt 52	Botol	6	106.560	639.360			639.360
10	tinta printer 003 cyan	Botol	3	97.680	293.040			293.040
11	tinta printer 003 hitam	Botol	6	97.680	586.080			586.080
12	tinta printer gt 53 xl	Botol	2	120.990	241.980			241.980
13	tinta printer 003 magenta	Botol	1	97.680	97.680			97.680
15	toner 17 a	Pcs	4	1.054.500	4.218.000			4.218.000
6)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik				-			3.241.200
1	baterai AA	lusin	6	83.250	499.500			499.500

2	lampu litrik hemat energi 40 watt	buah	38	57.720	2.193.360			2.193.360
3	baterai AAA	lusin	13	42.180	548.340			548.340
7)	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Kantor Lainnya				9.785.760			9.785.760
1	tissue isi 250	set	85	14.430	1.226.550			1.226.550
3	tissue Box isi 200	box	86	23.865	2.052.390			2.052.390
5	sapu panjang	pcs	5	87.690	438.450			438.450
7	hand soap refill 900 ml	botol	68	27.195	1.849.260			1.849.260
9	sabun cuci piring	bks	24	16.650	399.600			399.600
10	sikat wc	pcs	10	25.530	255.300			255.300
11	sapu lantai	pcs	10	64.380	643.800			643.800
12	kanebo jumbo	pcs	7	46.620	326.340			326.340
13	sapu pel	pcs	8	44.400	355.200			355.200
14	deterjen 1,2 kg	bks	32	32.745	1.047.840			1.047.840
15	pembersih kamar mandi	bks	13	22.200	288.600			288.600
16	bendera merah putih	pcs	2	149.850	299.700			299.700
17	sapu lobbi	pcs	3	73.260	219.780			219.780
18	kapur barus bulat	bks	23	16.650	382.950			382.950
II	Bahan Tak Pakai Habis		-	-	-			-
III	Barang Bekas Dipakai		-	-	-			-
TOTAL PERSEDIAAN								38.654.961

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2025	Nilai pada Saat Neraca Awal Tahun 2005	Nilai Apraisal	Harga Pembelian Tahun 2006 s/d 2025
A	ASET TETAP	46.935.942.180,00	6.337.271.825,00	-	40.598.670.355,00
1	TANAH	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00	-	-
2	PERALATAN & MESIN	18.904.003.865,00	736.681.825,00	-	18.167.322.040,00
3	GEDUNG & BANGUNAN	22.386.421.945,00		-	22.386.421.945,00
4	JALAN,IRIGASI,JARINGAN				-
5	ASET TETAP LAINNYA	44.926.370,00	-	-	44.926.370,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				-
	Jumlah Aset Tetap	46.935.942.180,00	6.337.271.825,00		40.598.670.355,00
B	ASET LAINNYA	2.297.564.432,00	-	-	2.297.564.432,00
1	ASET TIDAK BERWUJUD	1.749.083.432,00		-	1.749.083.432,00
2	ASET TIDAK BERMANFAAT	548.481.000,00		-	548.481.000,00
3	ASET DIMANFAATKAN OLEH PIHAK LAIN				-
4	ASET DALAM PENELUSURAN				-
	Jumlah Aset Lainnya	2.297.564.432,00	-	-	2.297.564.432,00
	JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	49.233.506.612,00	6.337.271.825,00		42.896.234.787,00

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,


 Dr. Zefnihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan / Kegiatan	Nilai Kontrak	Tingkat Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian	Harga Perolehan sampai 31 Des 2025	Nama KPA/pPTK	Ket
NIHIL							

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefrihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2025
(DAFTAR PENGADAAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TAHUN 2025)

NO	URAIAN	NO,Tgl SP2D/Kuintansi	No,Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Jk Waktu Pelaksanaan	NO, Tgl BAST	Lokasi Barang	Panjang Luas	Merk/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total Harga	KET
A	TANAH												
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PERALATAN & MESIN												
1	Laptop	13.00/04.0/0000073/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 4 Desember 2025	020/07/XI/SP/Bappeda-2025 tanggal 6 November 2025	PT Cipta Solusi Digatech	14 (empat belas) hari kerja	020/140/XI/SP/B appeda-2025 tanggal 19	BAPPEDA Provinsi Sumatera barat			12	22.755.000,00	273.060.000,00	Harga sdh termasuk pajak
C	GEDUNG & BANGUNAN												
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	JLN, JARINGAN & IRIGASI												
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	ASET TETAP LAINNYA												
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	ASET LAINNYA												
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL												273.060.000	

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefrihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2025

No	URAIAN	No.tgl SP2D/ Kuitansi	No.tgl kontrak	Nama Rekanan	MERK/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total	Ket
A	BM.TANAH								
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BM.PERALATAN & MESIN								
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
C	BM.GEDUNG & BANGUNAN								
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
D	BM.JLN,IRIGASI & JARINGAN								
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
E	BM. ASET TETAP LAINNYA								
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						Rp -	Rp -	-

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,


Dr. Zefrihan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741025 199311 1 001

DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR TAHUN 2025

No	URAIAN / DIKAPITALISIR KE JENIS ASET TETAP & ASET LAINNYA	No, tgl/ SP2D/ Kuintansi	No, tgl/ Kontrak	Nama Rekanan	Merk/Type	Jumlah Unit/paket	Harga Satuan	Total Harga
A	KE TANAH							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
B	KE PERALATAN & MESIN							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
C	KE GEDUNG & BANGUNAN							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
D	KE JLN, IRIGASI & JARINGAN							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
E	KE ASET TETAP LAINNYA							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
F	KE ASET LAINNYA							
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Dr. Zefrihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

REGISTER SP2D
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D										Akumulasi
				UP	GU Nihil	GU	TU	L S				Pembiayaan		
								Gaji	Barang Jasa Lainnya	Modal				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13		
1	13.00/04.0/000001/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	03-01-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Januari 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 74 Pegawai / 215 Jiwa	-	-	-	-	408.413.676	-	-	-	408.413.676		
			JUMLAH JANUARI	-	-	-	-	408.413.676	-	-	-	408.413.676		
			JUMLAH SID JANUARI	-	-	-	-	408.413.676	-	-	-	408.413.676		
1	13.00/04.0/000002/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	01-02-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Februari 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 74 pegawai / 216 jiwa	-	-	-	-	409.688.015	-	-	-	818.101.691		
2	13.00/04.0/000003/UP/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	07-02-2025	Pemintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	529.337.000	-	-	-	-	-	-	-	1.347.438.691		
3	13.00/04.0/000004/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	12-02-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bulan Januari 2025 untuk 72 Pegawai	-	-	-	-	385.365.915	-	-	-	1.347.438.691		
			JUMLAH FEBRUARI	529.337.000	-	-	-	795.053.930	-	-	-	1.324.390.930		
			JUMLAH SID FEBRUARI	529.337.000	-	-	-	1.203.467.606	-	-	-	1.732.804.606		
1	13.00/04.0/000006/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	01-03-2025	Pembayaran Gaji Susulan Bulan Maret 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 pegawai / 4 jiwa	-	-	-	-	4.576.872	-	-	-	1.352.015.563		
2	13.00/04.0/000005/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	01-03-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Maret 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 74 pegawai / 216 jiwa	-	-	-	-	410.587.548	-	-	-	1.762.603.111		
3	13.00/04.0/000007/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	07-03-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bulan Februari 2025 untuk 74 Pegawai	-	-	-	-	389.045.002	-	-	-	1.762.603.111		
4	13.00/04.0/000008/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	19-03-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan bulan Januari dan Februari 2025	-	-	-	-	-	103.174.938	-	-	1.762.603.111		
5	13.00/04.0/000010/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	20-03-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan THR PNS Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 74 Pegawai	-	-	-	-	391.971.918	-	-	-	1.762.603.111		
6	13.00/04.0/000012/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/P/13/2025	25-03-2025	Pembayaran Gaji THR PNS Bulan Maret 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 74 pegawai / 220 jiwa.	-	-	-	-	413.074.492	-	-	-	2.175.677.603		
7	13.00/04.0/000011/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/P/13/2025	25-03-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan Januari dan Februari 2025	-	-	-	-	-	71.113.135	-	-	2.175.677.603		
8	13.00/04.0/000013/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/P/13/2025	27-03-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Januari dan Februari 2025	-	-	-	-	-	101.761.289	-	-	2.175.677.603		
			JUMLAH MARET	-	-	-	-	1.609.255.832	276.049.362	-	-	1.885.305.194		
			JUMLAH SID MARET	529.337.000	-	-	-	2.812.723.438	276.049.362	-	-	3.618.109.800		

1	13.00/04.0/000009/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	01-04-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan April 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 75 Pegawai/220 Jiwa	-	-	-	-	-	416.901.667	-	-	-	2.592.579.270
2	13.00/04.0/000015/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	10-04-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	402.790.698	-	-	-	2.592.579.270
3	13.00/04.0/000014/GU/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	10-04-2025	Bulan Maret 2025 untuk 74 Pegawai	-	-	-	-	479.117.843	-	-	-	-	3.071.697.113
4	13.00/04.0/000016/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	21-04-2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Ke-1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tanggal 01 Januari s.d 31 Maret 2025	-	-	-	-	-	2.846.825	-	-	-	3.074.543.938
5	13.00/04.0/000017/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	23-04-2025	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Periode April 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 2 pegawai / 5 jiwa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.074.543.938
6	13.00/04.0/000018/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	23-04-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan Maret 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	-	3.074.543.938
7	13.00/04.0/000019/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	23-04-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	3.074.543.938
8	13.00/04.0/000020/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	29-04-2025	Belanja Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	3.074.543.938
			Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Kantor (PAD)	-	-	-	-	-	-	53.699.620	-	-	3.074.543.938
			JUMLAH APRIL	-	-	-	-	479.117.843	822.539.190	150.655.750	-	-	1.452.312.783
			JUMLAH SID APRIL	529.337.000	-	-	-	479.117.843	3.635.262.628	426.705.112	-	-	5.070.422.583
1	13.00/04.0/000021/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/14/2025	01-05-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Mei 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 75 pegawai / 219 jiwa	-	-	-	-	-	416.784.242	-	-	-	3.491.328.180
2	13.00/04.0/000022/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	09-05-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat bulan April 2025 untuk 74 Pegawai	-	-	-	-	-	399.395.287	-	-	-	3.491.328.180
3	13.00/04.0/000023/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	22-05-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	3.491.328.180
4	13.00/04.0/000025/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	22-05-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan April 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	-	3.491.328.180
5	13.00/04.0/000024/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	22-05-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	3.491.328.180
6	13.00/04.0/000027/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	27-05-2025	Pembayaran Hutang tambahan Penghasilan (TPP) PNS Bulan Desember 2024 Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk 74 Pegawai	-	-	-	-	-	393.499.526	-	-	-	3.491.328.180
			JUMLAH MEI	-	-	-	-	-	1.209.679.055	96.956.130	-	-	1.306.635.185
			JUMLAH SID MEI	529.337.000	-	-	-	479.117.843	4.844.941.683	523.681.242	-	-	6.377.057.768
1	13.00/04.0/000026/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/15/2025	01-06-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Juni 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 75 Pegawai/217 Jiwa	-	-	-	-	-	417.455.050	-	-	-	3.908.783.230
2	13.00/04.0/000028/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	04-06-2025	Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 75 Pegawai/219 Jiwa	-	-	-	-	-	420.245.971	-	-	-	4.329.029.201
3	13.00/04.0/000029/GU/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	05-06-2025	Pembayaran Ganti Uang Ke-2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 April s.d 31 Mei 2025	-	-	-	-	371.348.768	-	-	-	-	4.700.377.969
4	13.00/04.0/000030/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	10-06-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat bulan	-	-	-	-	-	400.426.704	-	-	-	4.700.377.969
5	13.00/04.0/000031/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	16-06-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	4.700.377.969
6	13.00/04.0/000032/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	16-06-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Ke 13 PNS Tahun 2025 Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Untuk 74 Pegawai.	-	-	-	-	-	393.779.783	-	-	-	4.700.377.969
7	13.00/04.0/000033/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	17-06-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan bulan Mei 2024	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	-	4.700.377.969
8	13.00/04.0/000034/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/16/2025	19-06-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan Mei 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	-	4.700.377.969

3	13.00/04.0/0000056/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	07-10-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	381.465.209	-	-	-	7.539.080.185
4	13.00/04.0/0000059/GU/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	17-10-2025	Pembayaran Ganti Uang ke- 6 Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 s/d 17 Oktober 2025	-	-	510.769.050	-	-	-	-	-	8.049.849.235
5	13.00/04.0/0000058/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	17-10-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan September 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	8.049.849.235
6	13.00/04.0/0000060/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	17-10-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan September 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	8.049.849.235
7	13.00/04.0/0000057/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	17-10-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan September 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	8.049.849.235
	JUMLAH OKTOBER			-	-	896.751.342	-	-	-	96.956.130	-	1.764.135.936
	JUMLAH SID OKTOBER			529.337.000	-	2.585.768.617	-	-	-	1.008.441.892	-	13.784.019.511
1	13.00/04.0/0000061/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/10/2025	01-11-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan November 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 70 pegawai/201 jiwa	-	-	-	-	-	-	383.026.467	-	8.432.875.702
2	13.00/04.0/0000062/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025	07-11-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	374.531.742	-	8.432.875.702
3	13.00/04.0/0000063/GU/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025	11-11-2025	Pembayaran Ganti Uang ke- 7 Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober s/d 7 November 2025	-	-	466.675.161	-	-	-	-	-	8.432.875.702
4	13.00/04.0/0000064/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025	13-11-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Oktober 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	8.432.875.702
5	13.00/04.0/0000065/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025	13-11-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Oktober 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	8.432.875.702
6	13.00/04.0/0000066/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025	13-11-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan Oktober 2025 (PAD)	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	8.432.875.702
7	13.00/04.0/0000067/GU/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	25-11-2025	Pembayaran Ganti Uang ke-8 Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 s/d 24 November 2025	-	-	348.244.482	-	-	-	-	-	8.781.120.184
	JUMLAH NOVEMBER			-	-	814.919.643	-	-	-	96.956.130	-	1.669.433.982
	JUMLAH SID NOVEMBER			529.337.000	-	3.400.688.260	-	-	-	1.105.398.022	-	15.453.453.493
1	13.00/04.0/0000068/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	01-12-2025	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Desember 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 70 pegawai / 201 jiwa	-	-	-	-	-	-	383.746.330	-	9.164.866.514
2	13.00/04.0/0000070/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	03-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan November 2025	-	-	-	-	-	-	25.136.774	-	9.164.866.514
3	13.00/04.0/0000071/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	03-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan November 2025	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	9.164.866.514
4	13.00/04.0/0000069/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	04-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan November 2025	-	-	-	-	-	-	35.909.678	-	9.164.866.514
5	13.00/04.0/0000073/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	04-12-2025	Belanja Modal Personal Computer/Laptop	-	-	-	-	-	-	-	273.060.000	9.164.866.514
6	13.00/04.0/0000074/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	12-12-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bulan November 2025 untuk 69 Pegawai	-	-	-	-	-	-	375.675.791	-	9.164.866.514
7	13.00/04.0/0000075/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	16-12-2025	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Periode Desember 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 2 pegawai / 3 jiwa	-	-	-	-	-	-	946.489	-	9.165.813.003
8	13.00/04.0/0000076/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	23-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	-	64.437.960	-	9.165.813.003
9	13.00/04.0/0000077/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	23-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	-	65.851.609	-	9.165.813.003
10	13.00/04.0/0000078/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2	23-12-2025	Belanja Jasa Tenaga Sopir Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	-	46.096.131	-	9.165.813.003

11	13.00.04.0/000079/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/122	29-12-2025	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor, Bahan Cetak Penggandaan Dokumen Hilam Putih	-	-	-	-	-	-	89.911.556	-	-	9.165.813.003
12	13.00.04.0/000080/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PPR4/122 025	30-12-2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja PNS Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bulan Desember 2025 untuk 69 Pegawai	-	-	-	-	-	379.465.585	-	-	-	9.165.813.003
13													
			J U M L A H D E S E M B E R	-	-	-	-	-	1.139.834.195	363.253.386	273.060.000	-	1.776.147.581
			J U M L A H S I D D E S E M B E R	529.337.000	-	-	-	3.400.688.260	11.557.864.406	1.468.651.408	273.060.000	-	17.229.601.074

Padang, Mei 2026
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala,

Dr. Zénilhan, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741015 199311 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENJELASAN SELISIH LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2025

LRA			LO			PENJELASAN
Kode Rekening	URAIAN	Realisasi s/d 31 Desember 2025	Kode Rekening	URAIAN	Realisasi s/d 31 Desember 2025	
4	PENDAPATAN		8	PENDAPATAN-LO		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO		
4.1.1	Pajak Daerah		8.1.1	Pajak Daerah-LO		
4.1.2	Restribusi Daerah		8.1.2	Retribusi Daerah-LO		
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO		
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	-	8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO		
5	BELANJA		9	BEBAN		
5.1	BELANJA OPERASI		9.1	BEBAN OPERASI		
5.1.1	Belanja Pegawai	11.557.864.406,00	9.1.1	Beban Pegawai	11.164.364.880,00	Selish Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2023 dan Utang Belanja Pegawai 2024
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.332.174.688,00	9.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	Selish Persediaan, Hutang Belanja dan Belanja Dibayar Dimuka
5.1.3	Belanja Hibah	-	9.1.2	Beban Hibah		
			9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.004.859.683,52	
			9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	16.890.039.094,00		JUMLAH BEBAN OPERASI	17.554.282.961,52	664.243.867,52
	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	0,00				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.060.000,00				Belanja Modal yg tdk ada beban
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00				
	JUMLAH BELANJA MODAL	273.060.000,00				(273.060.000,00)
	JUMLAH BELANJA	17.163.099.094,00			17.554.282.961,52	391.183.867,52
	SURPLUS /DEFISIT	(17.163.099.094,00)			(17.554.282.961,52)	(391.183.867,52)

Padang, Mei 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

JURNAL PENYESUAIAN
PER 31 Desember 2025

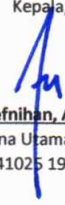
NO	TGL	URAIAN	KODE AKUN	DEBET	KREDIT
01/JP/UtgTP PDes2024/B	30 Juni 2025	Pengakuan Pembayaran Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024			
		Utang TPP Beban Kerja	2.1.06.01.02.0001	271.235.769,00	
		Utang TPP Kondisi Kerja	2.1.06.01.02.0005	109.789.632,00	
		Utang BPJS Kesehatan 4 %	2.1.06.01.01.0017	12.474.125,00	
		Beban TPP Beban Kerja	8.1.01.02.01.0001		271.235.769,00
		Beban TPP Kondisi Kerja	8.1.01.02.03.0001		109.789.632,00
		Beban BPJS Kesehatan 4 %	8.1.01.01.09.0001		12.474.125,00
02/JP/Utg/B appeda	30 Juni 2025	Koreksi Pengakuan Utang Belanja Air, Telepon dan Listrik per 31 Desember 2024			
		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001	82.200,00	
		Utang Belanja Jasa Kantor- TagihanTelepon	2.1.06.02.02.0059		60.000,00
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	2.1.06.02.02.0060		22.200,00
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	2.1.06.02.02.0061		-
03/JP/Utg/B appeda	30 Juni 2025	Pengakuan Pembayaran Utang Belanja Air, Telepon dan Listrik Per 31 Desember 2024			
		Utang Belanja Jasa Kantor- TagihanTelepon	2.1.06.02.02.0059	323.292,00	
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	2.1.06.02.02.0060	2.023.200,00	
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	2.1.06.02.02.0061	20.503.170,00	
		Beban Tagihan Telepon	8.1.02.02.01.0059		323.292,00
		Beban Tagihan Air	8.1.02.02.01.0060		2.023.200,00
		Beban Tagihan Listrik	8.1.02.02.01.0061		20.503.170,00
04/JP/Pers/ Bappeda	30 Juni 2025	Penyesuaian Persediaan			
		BBM			
		Beban Bahan Bakar Minyak	8.1.02.01.01.0004	16.503.000,00	
		Bahan Bakar Minyak	1.1.12.01.01.0004		16.503.000,00
	30 Juni 2025	Alat Tulis Kantor			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024	7.035.181,00	
		Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001		7.035.181,00
	30 Juni 2025	Kertas dan Cover			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.1.02.01.01.0025	3.126.370,00	
		Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002		3.126.370,00
	30 Juni 2025	Bahan Komputer			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029	5.493.495,00	
		Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006		5.493.495,00
	30 Juni 2025	Bahan Kantor Lainnya			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor La	8.1.02.01.01.0036	1.708.100,00	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain	1.1.12.01.03.0013		1.708.100,00
05/JP/Kend/ Bappeda	30 Juni 2025	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan (Saldo Awal)			
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan)	8.1.02.02.02.0008	8.778.707,00	
		Beban dibayar di muka	1.1.11.01.01.0001		8.778.707,00
06/JP/Gedu ng/Bappeda	30 Juni 2025	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Gedung (Saldo Awal)			
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah (gedung)	8.1.02.02.02.0008	24.967.852,00	
		Beban dibayar di muka	1.1.11.01.01.0001		24.967.852,00

07/JP/Kend/Bappeda	30 Juni 2025	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan (Belanja Tahun 2025)			
		Beban dibayar di muka	1.1.11.01.01.0001	35.799.747,00	
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan)	8.1.02.02.02.0008		35.799.747,00
08/JP/AsetPM/Bappeda	30 Juni 2025	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			
		Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	8.1.08.01.01.0002	742.500,00	
		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.1.08.01.02.0002	25.245.625,02	
		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.1.08.01.02.0004	2.072.789,04	
		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	8.1.08.01.03.0003	7.891.099,98	
		Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.1.08.01.05.0005	12.244.200,00	
		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	8.1.08.01.05.0006	23.243.700,18	
		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.1.08.01.05.0008	393.837,90	
		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.1.08.01.05.0009	29.402.499,96	
		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	8.1.08.01.05.0011	7.419.999,96	
		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	8.1.08.01.05.0013	5.209.499,82	
		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	8.1.08.01.05.0015	2.798.400,00	
		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	8.1.08.01.05.0019	603.999,96	
		Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	8.1.08.01.06.0002	99.000.000,00	
		Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	8.1.08.01.06.0017	230.000,04	
		Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	8.1.08.01.07.0001	175.000,02	
		Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	8.1.08.01.10.0002	36.811.617,18	
		Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	8.1.08.01.10.0005	679.375,02	
		Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.1.08.01.10.0006	6.814.875,06	
		Akm Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	1.3.07.01.01.0002		742.500,00
		Akm Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.07.01.02.0002		25.245.625,02
		Akm Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.07.01.02.0004		2.072.789,04
		Akm Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.3.07.01.03.0003		7.891.099,98
		Akm Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.3.07.01.05.0005		12.244.200,00
		Akm Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.3.07.01.05.0006		23.243.700,18
		Akm Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.3.07.01.05.0008		393.837,90
		Akm Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.3.07.01.05.0009		29.402.499,96
		Akm Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	1.3.07.01.05.0011		7.419.999,96
		Akm Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.3.07.01.05.0013		5.209.499,82
		Akm Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.3.07.01.05.0015		2.798.400,00
		Akm Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	1.3.07.01.05.0019		603.999,96
		Akm Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.3.07.01.06.0002		99.000.000,00
		Akm Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	1.3.07.01.06.0017		230.000,04
		Akm Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.3.07.01.07.0001		175.000,02
		Akm Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.3.07.01.10.0002		36.811.617,18
		Akm Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.3.07.01.10.0005		679.375,02
		Akm Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.3.07.01.10.0006		6.814.875,06
09/JP/AsetGB/Bappeda	31 Juni 2025	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester I 2025			
		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.1.08.02.01.0001	235.762.072,62	
		Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.3.07.02.01.0001		235.762.072,62
11/JP/GB/Bappeda	31 Juni 2025	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan			
		Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.3.07.02.01.0001	6.995.999,20	
		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001		6.995.999,20
12/JP/PM/Bappeda	31 Juni 2025	Mutasi Tambah antar SKPD (PM)			
		Alat studio (Proyektor)		27.040.800,00	
		Akm Penyusutan Proyektor	1.3.07.01.10.0006		27.040.800,00
13/JP/PM/Bappeda	31 Juni 2025	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin			
		Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	1.3.07.01.01.0001	0,28	

		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	1.3.07.01.03.0014		0,20
		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.3.07.01.05.0005	46.599,40	
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.3.07.01.05.0006		3,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.3.07.01.05.0009		0,48
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	1.3.07.01.05.0011		0,20
		Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	1.3.07.01.05.0019	0,36	
		Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.3.07.01.06.0001	0,20	
		Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.3.07.01.06.0002		0,12
		Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	1.3.07.01.06.0017		0,24
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	1.3.07.01.06.0036		0,68
		Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.3.07.01.10.0002	3,04	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.3.07.01.10.0005	0,16	
		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001		46.598,52
SEMESTER II					
TAHUN 2025					
14/JP/Utang BJ/Bappeda	31 Des 2025	Pengakuan Utang Belanja Air, Telepon dan Listrik per 31 Desember 2025			
		Beban Tagihan Telepon	8.1.02.02.01.0059	263.292,00	
		Beban Tagihan Air	8.1.02.02.01.0060	5.914.437,00	
		Beban Tagihan Listrik	8.1.02.02.01.0061	16.468.233,00	
		Utang Belanja Jasa Kantor- TagihanTelepon	2.1.06.02.02.0059		263.292,00
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	2.1.06.02.02.0060		5.914.437,00
		Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	2.1.06.02.02.0061		16.468.233,00
14/JP/Persd /Bappeda	31 Des 2025	Penyesuaian Persediaan			
		BBM			
		BBM	1.1.12.01.01.0004	4.426.500	
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-BBM	8.1.02.01.01.0004		4.426.500,00
		Alat Tulis Kantor			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024	3.528.468,00	
		Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001		3.528.468,00
		Kertas dan Cover			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.1.02.01.01.0025	4.151.955,00	
		Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002		4.151.955,00
		Bahan Komputer			
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029	21.007.305,00	
		Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006		21.007.305,00
		Alat Listrik			
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.1.12.01.03.0008	3.241.200,00	
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.1.02.01.01.0031		3.241.200,00
		Bahan Kantor Lainnya			
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.1.12.01.03.0013	9.190.360,00	
		Beban Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.1.02.01.01.0036		9.190.360,00
15/JP/Ass Kend/Bappe	31 Des 2025	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan			
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan)	8.1.02.02.02.0008	26.849.810	
		Beban Dibayar dimuka	1.1.11.01.01.0001		26.849.810
16/JP/Ass Kend/Bappeda	31 Des 2025	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Asuransi Gedung			
		Beban premi asuransi gedung	8.1.02.02.02.0008	16.645.234	
		Beban jasa dibayar di muka	1.1.11.01.01.0001		16.645.234
		Beban Dibayar dimuka	1.1.11.01.01.0001	34.050.260,00	
		Beban Asuransi Barang Milik Daerah (gedung)	8.1.02.02.02.0008		34.050.260,00
17/JP/AT/Ba ppeda	31 Des 2025	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap			

		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001	2,56	
		Akm Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.3.07.01.10.0002		2,56
		Akm Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.3.07.01.10.0005	0,16	
		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001		0,16
		Akm Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.3.07.01.10.0006	0,16	
		Ekuitas	3.1.01.01.01.0001		0,16
		JUMLAH		1.704.523.988,33	1.704.523.988,33

Padang, Mei 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741025 199311 1 001

Lampiran Lainnya :

- ✓ BA Rekon Pendapatan dan Belanja
- ✓ BA Rekonsiliasi Aset
- ✓ BA Opname Persediaan
- ✓ Bank Statement
- ✓ BA Opname Kas
- ✓ Register Penutupan Kas
- ✓ Kutipan BKU
- ✓ Setoran UYHD



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025 ANTARA SKPD
DENGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2026, dilakukan rekonsiliasi antara Bidang Perbenaklap dengan SKPD terhadap realisasi pendapatan dan belanja SKPD tahun 2025 dengan posisi sebagai berikut:

SKPD : BAPPEDA
BULAN : DESEMBER 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			%	Keterangan
			s/d Bln Lalu	Bln Ini	s/d Bln Ini		
1	2	3	4	5	6,00	7	8
02	BELANJA DAERAH						
S1	SP2D UP	-	529.337.000,00		529.337.000,00		
S2	SP2D GU	-	3.400.688.260,00		3.400.688.260,00		
S3	SP2D TU	-	-		-		
S4	SP2D LS GAJI	-	10.418.030.211,00	1.139.834.195,00	11.557.864.406,00		
S5	SP2D LS BARANG DAN JASA	-	1.105.398.022,00	636.313.386,00	1.741.711.408,00		
	Jumlah Belanja Daerah	-	15.453.453.493,00	1.776.147.581,00	17.229.601.074,00		
03							
C1	CP GU		-	-	-		
C2	CP LS		-		-		
C3	CP TU		-	-	-		
	Pengembalian Sisa UYHD		-	66.501.980,00	66.501.980,00		
	Jumlah Contra Post Belanja		-	66.501.980,00	66.501.980,00		
				-	-		
04	PENGESAHAN SPJ SESUAI SIPKD						
	BELANJA OPERASI	17.307.986.289,00	14.937.754.493,00	1.952.314.601,00	16.890.069.094,00	97,59	
	Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	10.418.030.211,00	1.139.834.195,00	11.557.864.406,00	98,34	
	Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080,00	4.519.724.282,00	812.480.406,00	5.332.204.688,00	95,99	
	BELANJA MODAL	294.900.000,00	-	273.030.000,00	273.030.000,00		
	Belanja Modal Tanah		-				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	-	273.030.000,00	273.030.000,00		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan		-				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-				
	Belanja Modal Aset Lainnya						
	JUMLAH	17.602.886.289,00	14.937.754.493,00	2.225.344.601,00	17.163.099.094,00	97,50	
IV	KAS	POSISI PER AKHIR BULAN				KETERANGAN	
I	Kas Pada Bendahara Penerimaan				-		
II	Kas Pada Bendahara Pengeluaran				-		

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

PELAPORAN

DESTI ELNI, SE, MM
NIP. 197612041997032003

KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

ERWIN RYDAS, SE
NIP. 196907151991021002

PPK SKPD

HERA KURNIAWATI, SE, AK
NIP. 197607042006042004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI PENDAPATAN DAN BEBAN (LAPORAN OPERASIONAL) TAHUN 2025
ANTARA SKPD DENGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal 15 Desember 2025, dilakukan rekonsiliasi antara Bidang Perbenaklap dengan SKPD terhadap realisasi pendapatan dan beban SKPD tahun 2025 dengan posisi sebagai berikut:

SKPD : BAPPEDA
BULAN : NOVEMBER 2025

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-			
JUMLAH PENDAPATAN	-			
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	10.024.530.685,00			
Beban Barang dan Jasa - LO	4.528.687.578,00			
Beban Hibah - LO				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	496.741.091,76			
JUMLAH BEBAN	15.049.959.354,76			
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.049.959.354,76)			

KETERANGAN

A. Pendapatan LRA : -
Pendapatan LO : -
Selisih : -
B. Belanja : 14.937.754.493,00
Beban : 15.049.959.354,76
Selisih : (112.204.861,76)

PENJELASAN SELISIH

A. PENDAPATAN :

1. Pengajuan Klaim :
2. Penerimaan Piutang :
3. Pendapatan Diterima Dimuka :
4. :

B. BELANJA/ BEBAN

1. Realisasi Belanja Modal di LRA
2. Jurnal Penyesuaian
 - a. Persediaan 33.866.146
 - b. Utang Belanja Pegawai (393.499.526)
 - c. Utang Jangka Pendek (22.849.662)
 - d. Beban Premi Asuransi (2.053.188)
 - e. Utang Belanja Brg dan Jasa
 - f. Beban Penyusutan dan Amortisasi 496.741.092
 - g. Beban Penyisihan Piutang

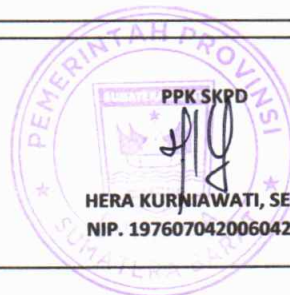
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA BIDANG PERBENDAKLAP

KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

DESTI ELNI, SE, MM
NIP. 197612041997032003

ERWIN RYAS, SE
NIP. 196907111991021002



HERA KURNIAWATI, SE, AK
NIP. 197607042006042004

BERITA ACARA REKONSILIASI TAHUNAN

Nomor : 17/BA-Rokan/PERM/SPKAD/1/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Defitza
NIP : 197410142007011006
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Pelaksana Pada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : MELKY EKA SAPUTRA, SE, M.Si.
NIP : 19840521 200901 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per 31 Desember 2025, Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA

MELKY EKA SAPUTRA, SE, M.Si.
Nip. 19840521 200901 1 002

PIHAK PERTAMA

Defitza
Nip. 197410142007011006

[illegible][illegible]

PTHA 2018-00000
 [Signature]
 Date: 10/10/2018

1. *Re: Knoxville Area (Newspaper)*

No	Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	1. Labor					
2	2. Material					
3	3. Transport					
4	4. Other					
5	5. Subtotal					
6	6. Grand Total					
7	7. Total					
8	8. Total					
9	9. Total					
10	10. Total					
11	11. Total					
12	12. Total					
13	13. Total					
14	14. Total					
15	15. Total					
16	16. Total					
17	17. Total					
18	18. Total					
19	19. Total					
20	20. Total					
21	21. Total					
22	22. Total					
23	23. Total					
24	24. Total					
25	25. Total					
26	26. Total					
27	27. Total					
28	28. Total					
29	29. Total					
30	30. Total					
31	31. Total					
32	32. Total					
33	33. Total					
34	34. Total					
35	35. Total					
36	36. Total					
37	37. Total					
38	38. Total					
39	39. Total					
40	40. Total					
41	41. Total					
42	42. Total					
43	43. Total					
44	44. Total					
45	45. Total					
46	46. Total					
47	47. Total					
48	48. Total					
49	49. Total					
50	50. Total					
51	51. Total					
52	52. Total					
53	53. Total					
54	54. Total					
55	55. Total					
56	56. Total					
57	57. Total					
58	58. Total					
59	59. Total					
60	60. Total					
61	61. Total					
62	62. Total					
63	63. Total					
64	64. Total					
65	65. Total					
66	66. Total					
67	67. Total					
68	68. Total					
69	69. Total					
70	70. Total					
71	71. Total					
72	72. Total					
73	73. Total					
74	74. Total					
75	75. Total					
76	76. Total					
77	77. Total					
78	78. Total					
79	79. Total					
80	80. Total					
81	81. Total					
82	82. Total					
83	83. Total					
84	84. Total					
85	85. Total					
86	86. Total					
87	87. Total					
88	88. Total					
89	89. Total					
90	90. Total					
91	91. Total					
92	92. Total					
93	93. Total					
94	94. Total					
95	95. Total					
96	96. Total					
97	97. Total					
98	98. Total					
99	99. Total					
100	100. Total					

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedadapro@sumbarprov.go.id



BERITA ACARA

PEMERIKSAAN DAN PERHITUNGAN PERSEDIAAN BARANG
BULAN DESEMBER 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Verawati Darmian, SE
Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pada Permendagri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan persediaan pada :

Nama : Defrizal
Jabatan : Pengurus Barang/Penyimpanan Barang pada Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemui hal-hal sebagai berikut :
Berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan barang yang ada dalam gudang dan kartu stock barang terdapat cocok sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir yaitu :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 3.792.426,-
2. Kertas dan Cover	Rp. 3.343.875,-
3. Bahan Komputer	Rp. 12.731.700,-
4. Alat Kebersihan	Rp. 9.785.760,-
5. Alat Listrik	Rp. 3.241.200,-
6. BBM Pertamax	Rp. 5.760.000,-
Jumlah Rp. 38.654.961,-	

Demikian Berita Acara pemeriksaan dan perhitungan persediaan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Umum & Kepegawaian
Verawati Darmian, SE
NIP. 19720810 200604 2 018

Padang, 30 Desember 2025
Pengurus Barang/Penyimpanan Barang
Defrizal
NIP. 19741014 200701 1 006

Diketahui oleh:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Setretaris,

Winda Savori, ST, MMP
NIP. 19731003 199803 2 005

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
UMUM PER 30 Desember 2025

No.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Total Persediaan				38.654.961
I.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK				3.792.426
1	Memo Stick	33	Pcs	6.660	219.780
2	Pembatas Kertas	64	Pcs	7.215	461.760
3	Stempel 111		Pcs	73.260	-
4	Pena Boldliner	1	Lusin	210.900	210.900
5	Buku Ekspedisi		Pcs	15.540	-
6	Penggaris Besi 30 cm	2	Pcs	8.325	16.650
7	Trigonal Clip No 5	40	Kotak	5.550	222.000
8	Whiteboard Magnetic uk 60x40		Pcs	105.450	-
9	Gunting Kertas	1	Pcs	13.320	13.320
10	Logitech R400	2	Pcs	210.900	421.800
11	Pena Dong a	4	Lusin	67.599	270.396
12	Brief Ordiner	3	Lusin	485.070	1.455.210
13	Trigonal Clip No 3	80	Kotak	2.886	230.880
14	Anak Hecler	10	Pcs	26.973	269.730
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				12.731.700
1	Toner 107a		Pcs	771.450	-
2	tinta printer 003 yello	2	Botol	97.680	195.360
3	tinta Printer Pgi		Pcs	188.700	-
4	Toner 85 a		Pcs	1.054.500	-
5	Toner 83 a	3	Pcs	1.082.250	3.246.750
6	tinta printer bi 5000 bk	2	Botol	133.200	266.400
7	Toner 79 a	3	Pcs	982.350	2.947.050
8	tinta printer bi 5000 c		Botol	133.200	-
9	tinta printer gt 52	6	Botol	106.560	639.360
10	tinta printer 003 cyan	3	Botol	97.680	293.040
11	tinta printer 003 hitam	6	Botol	97.680	586.080
12	tinta printer gt 53 xl	2	Botol	120.990	241.980
13	tinta printer 003 magenta	1	Botol	97.680	97.680
14	Toner 78 a		Pcs	1.221.999	-
15	toner 17 a	4	Pcs	1.054.500	4.218.000
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				3.343.875
1	Kertas HVS 75 gr f4	43	Rim	52.170	2.243.310
2	Kerts NCR Merah	2	Rim	57.165	114.330
3	Kertas NCR Kuning	2	Rim	57.165	114.330
4	Kertas HVS 75 gr A4	15	Rim	50.505	757.575
5	Kertas NCR Putih	2	Rim	57.165	114.330

Padang, Desember 2025
 Kasubag Umum & Kepegawaian
 Verawati Darmas, SE
 NIP.19720810 200604 2 018

1	BBM Pertamina	450		12.800	5.760.000
V.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Bakar Minyak				5.760.000
6	baterai AAA	13	lusin	42.180	548.340
5	lampu LED philips 20 watt		Buah	77.700	-
4	lampu listrik hemat energi 40 watt	38	Buah	57.720	2.193.360
3	lampu neon LED 36 watt		Buah	99.900	-
2	baterai AA	6	lusin	83.250	499.500
1	lampu listrik 60 watt		Buah	177.600	-
IV.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Listrik				3.241.200
18	kapur barus bulat	23	bks	16.650	382.950
17	sapu lobbi	3	pcs	73.260	219.780
16	bendera merah putih	2	pcs	149.850	299.700
15	pembersih kamar mandi	13	bks	22.200	288.600
14	deterjen 1,2 kg	32	bks	32.745	1.047.840
13	sapu pel	8	pcs	44.400	355.200
12	kanebo jumbo	7	pcs	46.620	326.340
11	sapu lantai	10	pcs	64.380	643.800
10	sikat wc	10	pcs	25.530	255.300
9	sabun cuci piring	24	bks	16.650	399.600
8	pembersih lantai		bks	19.980	-
7	hand soap refill 900 ml	68	botol	27.195	1.849.260
6	pembersih kaca		bks	17.760	-
5	sapu panjang	5	pcs	87.690	438.450
4	kapur barus		bks	19.980	-
3	tissue Box isi 200	86	box	23.865	2.052.390
2	hand soap 500 ml	0	bks	33.300	-
1	tissue isi 250	85	set	14.430	1.226.550
IV.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Kebersihan				9.785.760

Nomor : ---
Lampiran : ---
Perihal : Bank Statement

Kepada Yth.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 1
di-
PADANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15.5/11/Isr/Bappeda-2026 tanggal 07 Januari 2026 perihal permintaan Bank Statement Rekening BP dan BPP per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Des 2025	Status Rekening
1	Pemegang Kas Bappeda Prop Sumbar	71000106100254	Rp. 0,-	Aktif
2	Kas Sekretariat Bappeda Prop Sumbar	71000106008871	Rp. 0,-	Aktif

Demikian disampaikan untuk dapat diterima dan terima kasih.

CABANG UTAMA PADANG

AFNIS INDRAWATI

Pemimpin Bagian Dana, APUPPT,
dan Sistem Pembayaran



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---------------------------|
| 1. Nama | : Yudha Prima, SSTP, M.si |
| NIP | : 198201212000121001 |
| Jabatan | : Pengguna Anggaran |
| 2. Nama | : Harini, SE |
| NIP | : 197702112009012004 |
| Jabatan | : Bendahara Pengeluaran |

Yang ditunjuk dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 903-10-2025 tanggal 6 Januari 2025, ditugaskan mengurus keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang berada dalam pengawasan ini, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

- | | |
|---|-------|
| a. Uang kertas | Rp. 0 |
| b. Uang logam | Rp. 0 |
| c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan. | Rp. 0 |
| d. Saldo Bank Rek. No. | Rp. 0 |
| e. Surat/barang/benda berharga lainnya | Rp. 0 |
| Jumlah | Rp. 0 |

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register, dan lain sebagainya berjumlah
 Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dengan saldo buku
 Penjelasan perbedaan positif/negatif : -

Yang diperiksa :

Bendahara Pengeluaran,

Harini, SE

NIP. 197702112009012004

Yang memeriksa :

Pengguna Anggaran

Yudha Prima, SSTP, M.Si
 NIP.198201212000121001



REGISTER PENTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2025

Nama Penutup Kas

: Hartini, SE

Tanggal Penutupan Kas yang lalu :

Jumlah transaksi Januari s.d Desember 2025

- Jumlah penerimaan Januari s.d Desember 2025

- jumlah pengeluaran Januari s.d Desember 2025

Saldo Buku

Saldo Kas

Terdiri atas :

1. Uang kertas ;

Pecahan Rp.100.000,- =

Pecahan Rp. 50.000,- =

Pecahan Rp. 20.000,- =

Pecahan Rp. 10.000,- =

Rp. 5.000,- =

Rp. 1.000,- =

Pecahan Rp. 500,- =

2. Wang logam ;

Rp. 1.000,- =

Pecahan Rp. 500,- =

Pecahan Rp. 200,- =

100,- = Pecahan Rp.

50,- = Pecahan Rp.

25.- = Pecahan Rp.

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan Ordnasi/SP2D, wesel, cek, saldo bank, dsb.

Ordonansi/SP2D, wesel, cek, saldo bank, dsb.

- Perbedaan positif/negatif

Penjelasan perbedaan : -

Pengguna Anggaran,

Yudha Prima, SSTP, M.S!
NIP.198201212000121001

NIP.198201212000121001

Bendahara Pengeluaran,

Harini, SE /

NIP. 197702112009012004

FORMULIR 3

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
KUTIPAN BKU TAHUN 2025

NO	BULAN	PENERIMAAN Rp.	PENGELUARAN Rp.
1	JANUARI	408.413.676	408.413.676
2	FEBRUARI	1.324.390.930	1.060.016.472
3	MARET	1.885.305.194	2.099.460.495
4	APRIL	1.452.312.783	1.180.823.388
5	MEI	1.306.635.185	1.470.355.505
6	JUNI	2.100.212.406	2.131.598.209
7	JULI	1.312.620.985	1.230.600.958
8	AGUSTUS	1.334.184.891	1.144.456.310
9	SEPTEMBER	895.807.525	1.150.803.854
10	OKTOBER	1.764.135.936	1.650.077.060
11	NOVEMBER	1.669.433.982	1.411.148.566
12	DESEMBER	1.776.147.581	2.225.344.601
JUMLAH		17.229.601.074	17.163.099.094

Padang, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran
Hartini, SE
NIP. 197702112009012004



NAGARI CASH MANAGEMENT
BUKTI TRANSAKSI

Id Transaksi	: 36960560
Tanggal	: 2025-12-30 14:50:33
Jenis Transaksi	: Transfer Antar Rekening
Dari Rekening	: 71000106100254
Rekening Tujuan	: 998877000000033014
Nama Penerima	: Setoran Sisa UYHDTU
Bank Tujuan	: 118 - Bank Nagari
Nominal	: 66,501,980.00
Jenis Pembayaran	: 397 - Pengembalian Sisa UYHD
Keterangan	: Pengembalian Sisa YUHD Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Status Transaksi	: BERHASIL

-Terima Kasih-